



**TAHUN
2021**



LAPORAN KINERJA

**Dinas Komunikasi,
Informatika Dan Statistik**
Kabupaten Kapuas Hulu



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 ini dapat tersusun, sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu atas target kinerja dan penggunaan anggaran serta pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021. Dengan harapan laporan kinerja ini dapat menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja selanjutnya secara lebih produktif, efektif, dan efisien dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021 disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan memberikan gambaran kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tahun 2021 dan menjadi acuan yang berkesinambungan dalam perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih terarah. Masukkan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan kinerja di tahun-tahun berikutnya.

Putussibau, Januari 2022
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
Dan Statistik
Kabupaten Kapuas Hulu

Ir. ISTIWA, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650507 199803 1 006

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu ini menyajikan berbagai keberhasilan atau capaian strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik selama tahun 2021 dan beberapa hal yang perlu perbaikan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian indikator kinerja maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang didasarkan pada target kinerja yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja tahun 2021.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kerja ini akan dapat memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan realisasi. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga salah satu keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk dapat memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator *outcome* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian sasaran, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2021 memiliki sebanyak 4 (Empat) sasaran dengan 4 (Empat) indikator. Realisasi target kinerja menunjukkan bahwa hasil pencapaian seluruh sasaran program Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik pada Tahun 2021 dikategorikan sangat berhasil. Diharapkan capaian kinerja pada tahun mendatang dapat lebih ditingkatkan dan harus diupayakan seoptimal mungkin pencapaiannya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. UMUM	1
B. GAMBARAN UMUM DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	2
C. PERMASALAHAN UTAMA	13
 BAB II : PERENCANAAN STRATEGIS	 37
A. RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	37
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	39
 BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	 41
A. CAPAIAN KINERJA	41
1. Pengukuran Kinerja	41
2. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	45
B. REALISASI ANGGARAN	53
 BAB IV : AKUNTABILITAS KINERJA	 83
LAMPIRAN:	
1. Pengukuran Kinerja Dinas Kominfo dan Statistik	
2. Perjanjian Kinerja 2021	
3. Buku Data Statistik Sektorial Kab. Kapuas Hulu Tahun 2021	
4. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021	
5. Hasil Nilai SAKIP Pada pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat	
6. Hasil nilai SAKIP pada pemerintahan Dinas Komunikasi, Informatik dan Statistik Kabupaten Kubu Raya	
7. Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.	
8. Hasil Penilaian IKM dari Pihak Akademis PDD Politeknik Negeri Pontianak di Kab. Kapuas Hulu Bekerja sama dengan Bagian Organisasi Pemerintahan	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Golongan dan Eselon berdasarkan Tingkat Pendidikan	11
Tabel 1.2	Sarana dan Prasarana Utama	12
Tabel 1.3	Registrasi Ulang Domain Tahun 2021	14
Tabel 1.4	Daftar Nama Domain Dan Sub Domain Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	16
Tabel 1.5	Nama Sub Domain Website Kabupaten Kapuas Hulu	18
Tabel 1.6	Nilai Indeks SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	24
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu	38
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja 2021	40
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2021	43
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama	44
Tabel 3.3	Pencapaian Kinerja Sasaran	44
Tabel 3.4	Analisis Pencapaian Kinerja sasaran 1 Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	45
Tabel 3.5	Analisis pencapaian Kinerja Sasaran 1 Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya	46
Tabel 3.6	Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Dibandingkan Dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis (Renstra)	46
Tabel 3.7	Analisis Pencapaian Kinerja sasaran 3 Meningkatnya kualitas pelayanan public dan informasi public berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	49
Tabel 3.8	Analisis pencapaian Kinerja Sasaran 3 Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya	49
Tabel 3.9	Analisis Pencapaian Kinerja sasaran 4 Meningkatnya pengelolaan data statistic sektoral Kabupaten Kapuas Hulu	51
Tabel 3.10	Analisis pencapaian Kinerja Sasaran 4 Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya	51

Tabel 3.11	Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 4 Dibandingkan Dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis (Renstra)	52
Tabel 3.12	Realisasi Belanja Tidak Langsung	54
Tabel 3.13	Realisasi Belanja Langsung	58
Tabel 3.14	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Anggaran Tahun 2019	81



BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Hasil evaluasi tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu yang disusun setiap tahun sebagai bentuk kewajiban Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam mempertanggungjawabkan tujuan dan sasaran serta rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja tahun 2021.

Laporan Kinerja ini merupakan laporan hasil capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 dan digunakan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk tahun-tahun berikutnya, karena tahun 2021 merupakan tahun awal dari Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026, maka pada laporan kinerja tahun 2021 akan dianalisis sebagai capaian awal atau pondasi dalam rangka mencapai target Renstra tahun 2021-2026.



1. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Pelaporan ini dimaksud untuk mengkomunikasikan capaian kinerja pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam tahun anggaran 2021 yang dikaitkan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang disusun pada awal tahun. Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran serta target Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun **2021-2026**.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu selama tahun 2021.

B. GAMBARAN UMUM DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik sesuai dengan kewenangan dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian.
- b. Fungsi Kepala Dinas sebagai berikut:
 1. Penyusunan rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 2. pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik dengan instansi lainnya;
 3. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 4. pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan program kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 5. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Dinas;
 6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas;
 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

- a. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatausahaan dan kerumah tanggaan Dinas.
- b. Fungsi:
 1. Penyusunan program kerja Sekretariat;
 2. Pengkoordinasian penyusunan program kerja Dinas;
 3. Pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
 4. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumberdaya aparatur, dan tata laksana Dinas;

5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumahtangga, dan pengelolaan barang milik Dinas;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas;
7. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat, dibantu oleh Subbagian Program dan Keuangan dan Subbagian Umum dan Aparatur.

2.1 Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan program kerja serta pengelolaan administrasi keuangan Dinas, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Dinas;
- c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
- d. Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Dinas;
- e. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
- f. Pengendalian dan pelaporan program kerjadinas;
- g. Penyelenggaraan tata usaha keuangan Dinas;
- h. Penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas;

- i. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Dinas;
- j. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Keuangan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sub Bagian Umum dan Aparatur

Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas membantu secretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumahtangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Dinas. Sub Bagian Umum dan Aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- b. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur Dinas;
- c. Penyelenggaraan ketatalaksanaan dinas;
- d. Penyelenggaraan urusan ketatalaksanaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- e. Pengelolaan barang milik Dinas;
- f. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan program pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang menjadi kewenangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Komunikasi dan Informasi Publik melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja Bidang Komunikasi dan Informasi Publik;
- b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan melaksanakan program pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- c. penyusunan rencana program dan pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- d. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah;
- e. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Komunikasi dan Informasi Publik;
- f. pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Komunikasi dan Informasi Publik secara periodik;
- g. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Komunikasi dan Informasi Publik secara periodik; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.1 Kepala Seksi Komunikasi dan Media Publik

Kepala Seksi Komunikasi dan Media Publik mempunyai tugas membantu Bidang Komunikasi dan Informasi Publik dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan pengelolaan komunikasi publik Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Komunikasi dan Media Publik melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Komunikasi dan Media Publik;
- b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan komunikasi publik Pemerintah Daerah;

- c. penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- d. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- e. pengelolaan media komunikasi publik dan manajemen komunikasi krisis;
- f. penyelenggaraan Layanan Hubungan Media dan Hubungan Masyarakat serta Kemitraan Komunitas dan Pemangku Kepentingan;
- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Komunikasi dan Media Publik; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Kepala Seksi Pengelolaan Informasi

Kepala Seksi Pengelolaan Informasi mempunyai tugas membantu Bidang Komunikasi dan Informasi Publik dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan pengelolaan informasi publik Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengelolaan Informasi melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Informasi;
- b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan informasi publik Pemerintah Daerah;
- c. penguatan tata kelola komisi informasi di Daerah;
- d. pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
- e. pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;

- f. pelayanan informasi publik;
- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Informasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika

Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan program penyelenggaraan statistik sektoral, aplikasi informatika dan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika;
- b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan melaksanakan program penyelenggaraan statistik sektoral, aplikasi informatika dan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
- c. pelaksanaan program penyelenggaraan statistik sektoral;
- d. pelaksanaan program penyelenggaraan aplikasi informatika;
- e. pelaksanaan program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
- f. pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika secara periodik;
- g. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika secara periodik; dan

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4.1 Kepala Seksi Statistik

Kepala Seksi Statistik mempunyai tugas membantu Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah serta penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Statistik melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Statistik;
- b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
- c. penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah;
- d. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
- e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Statistik; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Seksi Aplikasi Informatika

Kepala Seksi Aplikasi Informatika mempunyai tugas membantu Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah serta pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Aplikasi Informatika melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Aplikasi Informatika;
- b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah serta pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah;
- c. pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah;
- d. serta pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah;
- e. dihapus;
- f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Aplikasi Informatika; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Jumlah dan kualitas SDM merupakan salah satu elemen penting dalam suatu organisasi sebagai penentu keberhasilan organisasi. Jumlah Aparatur Sipil

Negara (ASN) pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik sampai dengan 31 Desember 2021 adalah 15 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1

Komposisi Golongan dan Eselon Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Golongan				Eselon			K e t
			I	II	III	IV	II	III	IV	
1.	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	SLTA	1	-	1	-	-	-	-	-	-
4.	SARJANA MUDA	2	-	-	2	-	-	-	1	-
5.	SARJANA	9	-	-	7	2	-	1	5	-
6.	PASCA SARJANA	3	-	-	-	3	1	2	-	-
Jumlah		15	-	1	9	5	1	3	6	-

Untuk memperlancar kegiatan-kegiatan di dalam maupun di luar Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, selain ASN juga ada Tenaga Kontrak yang berjumlah 18 orang yang termasuk penyiar LPPL Rasika-FM.

1.3. SUMBER DAYA KEUANGAN

Faktor penting yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran adalah ketersediaan dana sehingga program-program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu mengelola dana yang semuanya bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2021.

1.4. SARANA DAN PRASARANA

Untuk menunjang optimalisasi pekerjaan, perlu adanya Sarana dan Prasarana yang memadai. Sarana dan Prasarana utama yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. Sarana dan Prasarana utamaselain aset-aset yang terdata dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) atau Buku Inventaris yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1.2

Sarana dan Prasarana Utama

No	Nama Barang	Jumlah	Ket
1	Gedung Kantor	3	Baik
2	Mobil	2	1 Rusak/ 1 Baik
3	Sepeda Motor	12	10 rusak /2 Baik
4	Komputer	15	Baik



5	NoteBook	14	Baik
6	Laptop	15	12 Baik/ 3 rusak berat
7	Televisi	4	3 Baik/ 1 rusak
8	Kamera Digital	7	Baik
9	Kamera elektronik	2	Baik
10	Genset	1	Baik
11	Meja Kerja	15	Baik
12	Kursi Kerja	2	Baik
13	Lemari Arsip	3	Baik
14	Air Conditioner (AC)	12	5 Baik/ 7 rusak berat
15	Camcoder	2	Baik
16	Printer	17	12 Baik/ 5 rusak berat
17	Kursi tamu	3	baik
18	Drone	1	baik

C. PERMASALAHAN UTAMA (ISSUE STRATEGIS)

Pada pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika saat ini telah memasuki era reformasi artinya masyarakat telah menuntut adanya transparansi dan keterbukaan serta keberpihakan kepada masyarakat khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan daerah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung keterlibatan public dalam pelaksanaan pembangunan, yang salah satunya adalah fasilitasi informasi public melalui website. Hal ini telah sejalan dengan komitmen pemerintah

terkait dengan pembangunan *e-Government* sebagaimana yang terdapat dalam intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional *e-Government*.

Berdasarkan hal tersebut maka pengembangan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan public secara efektif dan efisien.

Permasalahan Utama (issue Strategis) yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam melaksanakan layanan tugas pokok dan fungsi, yaitu :

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Daerah

Pelaksanaan dalam sub kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Daerah ada dua domain yang di Kelola yang pertam domain kapuashulukab.go.id dan domain desa.id.

Target dalam pengelolaan domain untuk tahun 2021 sebanyak 10 domain, sedangkan yang terealisasi regristrasi ulang untuk tahun 2021 sebanya **11 domain**.

Tabel 1.3

Regristrasi Ulang Domain Tahun 2021

NO.	NAMA DOMAIN	PENGELOLA
1.	Kapuashulukab.go.id	Diskominfotik Kab. Kapuas Hulu
2.	Jongkongkanan.desa.id	Diskominfotik Kab. Kapuas Hulu
3.	Kenerak.desa.id	Diskominfotik Kab. Kapuas Hulu
4.	Nangabetung.desa.id	Diskominfotik Kab. Kapuas Hulu

5.	Nangaembaloh.desa.id	Diskominfotik Kab. Kapuas Hulu
6.	Nangajemah.desa.id	Diskominfotik Kab. Kapuas Hulu
7.	Nangasangan.desa.id	Diskominfotik Kab. Kapuas Hulu
8.	Riyampiayang.desa.id	Diskominfotik Kab. Kapuas Hulu
9.	Semitauihulu.desa.id	Diskominfotik Kab. Kapuas Hulu
10.	Sriwangi.desa.id	Diskominfotik Kab. Kapuas Hulu
11.	Tunasmuda.desa.id	Diskominfotik Kab. Kapuas Hulu

Permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu pada sub kegiatan ini diantaranya adalah:

- Dalam pembayaran registrasi ulang dengan pengelola domain pusat (PANDI) untuk penyampaian invoice tagihan tidak tepat waktu.
- Dalam pemberian bukti terima pembayaran dari pengelola pusat (PANDI) sering terlambat.

b. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Bahwa Sub Kegiatan **Penatalaksanaan** dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota target capaiannya adalah terlaksananya Pengelolaan serta Monitoring Domain dan Sub Domain Website di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk tahun 2021 sebanyak 56 domain dan subdomain sementara target yang sudah di capai sebanyak 72 domain dan sub domain tahun 2021.

Adapun daftar nama domain, subdomain lembaga, layanan publik dan kegiatan dan website desa yang dimonitoring adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4**DAFTAR NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU***(Keadaan per 31 Desember 2021)***I. Nama Domain****a. Daftar Nama Domain Website Kabupaten Kapuas Hulu**

NO.	NAMA DOMAIN	PENGELOLA
1	www.kapuashulukab.go.id	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu
JUMLAH		1

b. Daftar Nama Domain Website desa.id

NO.	NAMA DOMAIN	DESA	KECAMATAN
1	nangabetung.desa.id	Nanga Betung	Boyan Tanjung
2	sriwangi.desa.id	Sriwangi	Boyan Tanjung
3	labian.desa.id	Labian	Batang Lupar
4	sepandan.desa.id	Sepandan	Batang Lupar
5	mensiau.desa.id	Mensiau	Batang Lupar
6	lanjakderas.desa.id	LanjakDeras	Batang Lupar
7	boyantanjung.desa.id	BoyanTanjung	Boyan Tanjung
8	sungaiabau.desa.id	Sungai Abau	Batang Lupar
9	senunuk.desa.id	Senunuk	Batang Lupar



10	tanimakmur.desa.id	Tani Makmur	Hulu Gurung
11	mentawit.desa.id	Mentawit	Hulu Gurung
12	setulang-batanglupar.desa.id	Setulang	Batang Lupar
13	kenerak.desa.id	Kenerak	Semitau
14	semitauhulu.desa.id	Semitau Hulu	Semitau
15	mubung.desa.id	Mubung	Hulu Gurung
16	labianiraang.desa.id	LabianIra'ang	Batang Lupar
17	nangajemah.desa.id	Nanga Jemah	Boyan Tanjung
18	melemba.desa.id	Melemba	Batang Lupar
19	tunasmuda.desa.id	Tunas Muda	Hulu Gurung
20	kelakar.desa.id	Kelakar	Hulu Gurung
21	simpangsenara.desa.id	SimpangSenara	Hulu Gurung
22	tekalong.desa.id	Tekalong	Mentebah
23	riampiyang.desa.id	RiamPiyang	Bunut Hulu
24	nangatepuai.desa.id	RangaTepuai	Hulu Gurung
25	segiam.desa.id	Segiam	Kalis
26	jongkongkanan.desa.id	JongkongKanan	Jongkong
27	rantaubumbun.desa.id	Rantau Bumbun	Kalis
28	nangasangan.desa.id	Nanga Sangan	Boyan Tanjung
29	miaumerah.desa.id	Miau Merah	Silat Hilir
30	sungaiantu.desa.id	Sungai Antu	Puring Kencana
31	marsedanraya.desa.id	Marsedan Raya	Semitau
32	beringin.desa.id	Beringin	Hulu Gurung



33	sejahteramandiri.desa.id	Sejahtera Mandiri	Hulu Gurung
34	teluksindur.desa.id	TelukSindur	Bika

II. Nama Sub Domain

Tabel 1.5

Nama Sub domain Website Kabupaten Kapuas Hulu

NO.	NAMA SUB DOMAIN	PENGELOLA
A	SUB DOMAIN OPD	
1	inspektorat.kapuashulukab.go.id	Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu
2	dprd.kapuashulukab.go.id	Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu
3	bappeda.kapuashulukab.go.id	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
4	bkd.kapuashulukab.go.id	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
5	bppd.kapuashulukab.go.id	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
6	bpbd.kapuashulukab.go.id	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
7	bkpsdm.kapuashulukab.go.id	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu
8	dinkes.kapuashulukab.go.id	Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu
9	disporapar.kapuashulukab.go.id	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan



		Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu
10	dukcapil.kapuashulukab.go.id	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu
11	diskominfo.kapuashulukab.go.id	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu
12	disperpusip.kapuashulukab.go.id	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu
13	disciptakarya.kapuashulukab.go.id	Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu
14	diskup.kapuashulukab.go.id	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu
15	dislingkunganhidup.kapuashulukab.go.id	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas Hulu
16	disbinamarga.kapuashulukab.go.id	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu
17	dpmptsp.kapuashulukab.go.id	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu
18	diskan.kapuashulukab.go.id	Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu
19	disnakertrans.kapuashulukab.go.id	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu



20	pemasdes.kapuashulukab.go.id	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas Hulu
21	dishub.kapuashulukab.go.id	Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu
22	dissosialp3ap2kb.kapuashulukab.go.id	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu
23	distanpangan.kapuashulukab.go.id	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu
24	disdikbud.kapuashulukab.go.id	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu
25	satpolpp.kapuashulukab.go.id	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
26	bpbj-setda.kapuashulukab.go.id	Bagian Pengadaan Barang Jasa Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
27	kec-badau.kapuashulukab.go.id	Kecamatan Badau
28	kec-selimbau.kapuashulukab.go.id	Kecamatan Selimbau
29	kec-jongkong.kapuashulukab.go.id	Kecamatan Jongkong
30	rsudadp.kapuashulukab.go.id	RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau
B	SUB DOMAIN KEGIATAN	
1	jdih.kapuashulukab.go.id	Bagian Hukum Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
2	lpse.kapuashulukab.go.id	Bagian Pengadaan Barang Jasa Pada Sekretariat Daerah



		Kabupaten Kapuas Hulu
3	simbaja.kapuashulukab.go.id	Bagian Pengadaan Barang Jasa Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
4	eproject.kapuashulukab.go.id	Bagian Pengadaan Barang Jasa Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
5	smep.kapuashulukab.go.id	Bagian Perekonomian dan pembangunan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
6	lppd.kapuashulukab.go.id	Bagian Pemerintahan Pada Sekretariat Kabupaten Kapuas Hulu
7	sakip.kapuashulukab.go.id	Bagian Organisasi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
8	sianjab.kapuashulukab.go.id	Bagian Organisasi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
9	siippro.kapuashulukab.go.id	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
10	ppid.kapuashulukab.go.id	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu
11	e-ppid.kapuashulukab.go.id	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu
12	statistiksektoral.kapuashulukab.go.id	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas



		Hulu
13	bukutamu-diskominfo.kapuashulukab.go.id	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu
14	arsip.diskominfo.kapuashulukab.go.id	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu
15	info.kapuashulukab.go.id	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu
16	covid19.kapuashulukab.go.id	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu
17	fds.kapuashulukab.go.id	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu
18	pariwisata.kapuashulukab.go.id	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu
19	siak.kapuashulukab.go.id	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu
20	geoportal.kapuashulukab.go.id	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
21	cloud.kapuashulukab.go.id	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
22	sirala.kapuashulukab.go.id	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu

23	ekinerja.kapuashulukab.go.id	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
24	eprilaku360.kapuashulukab.go.id	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu
JUMLAH A+B		54

Permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu pada sub kegiatan ini diantaranya adalah:

1. Saat memonitoring website / domain tergantung pada jaringan akses internet.
2. Penyediaan hosting masih menggunakan pihak ke tiga sehingga kapasitasnya berdasarkan paket sewa.

2. Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan pada Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah melaksanakan evaluasi mandiri SPBE Kabupaten Kapuas Hulu yang nantinya hasil dari evaluasi mandiri SPBE Kabupaten Kapuas Hulu disampaikan ke Kementerian PANRB Republik Indonesia untuk di nilai. Ada 26 OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang dievaluasi terkait penerapan SPBE.

Berdasarkan hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2021 yang dilakukan oleh Kementerian PANRB yang disampaikan melalui akun Kabupaten Kapuas Hulu monev.spbe.go.id. Bahwa hasil evaluasi SPBE Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 dari Kementerian PANRB mendapat **Nilai Indeks SPBE = 2.36** dengan **Predikat SPBE = CUKUP**. Adapun penilaian SPBE dari tahun 2018 – tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6

Nilai Indeks SPBE Kabupaten Kapuas Hulu

NO.	NILAI SPBE	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	Nilai Indeks	1,93	2,60	2,60	2,36
2	Nilai Predikat	Cukup	Baik	Baik	Cukup

Permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu pada sub kegiatan ini diantaranya adalah:

1. Terjadi penambahan domain dan indikator yang di nilai.
2. Dalam penilaian evaluasi SPBE mulai sangat ketat karena tidak hanya Kementerian PANRB tetapi melibatkan BSSN dan BPPT.
3. Kegiatan-kegiatan dalam penilaian SPBE belum masuk rencana kegiatan.
4. Belum bisa melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan nilai indeks SPBE yang disebabkan keterbatasan anggaran.
5. Komitmen pimpinan dalam melaksanakan kebijakan.
6. Tata kelola tidak terpadu.

7. Penerapan pelayanan belum optimal.
8. Jumlah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) SPBE masih terbatas.
9. Masih rendahnya budaya berbagi data dan informasi antar instansi pemerintah.
10. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) belum menjangkau seluruh instansi.
11. Pengelolaan keamanan informasi lemah di sistem seluruh instansi pemerintah.

b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah

Bahwa ketersediaan jaringan Internet dan Komunikasi Intra Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu yang menjadi penunjang penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sementara Jaringan Akses internet merupakan salah satu tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dimana sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika sementara Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu baru memberi layanan Jaringan Internet 1 Lokasi untuk Media Center Kapuas Hulu dan 1 Lokasi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu diantaranya adalah:

1. Belum terpusatnya jaringan akses internet di Kabupaten Kapuas Hulu yang menjadi layanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Belum tersedianya anggaran untuk layanan jaringan internet dan intra pemerintah untuk OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik kabupaten Kapuas Hulu;
3. Besarnya anggaran untuk kegiatan layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah;
4. Belum adanya penetapan ruang publik di Kabupaten Kapuas Hulu;
5. Fasilitas media center masih banyak yang kurang dan belum memenuhi standarisasi sebagai tempat media center.

c. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Sub Kegiatan Pemerintahan Berbasis Elektronik

Dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Sub Kegiatan Pemerintahan Berbasis Elektronik bahwa target awal akan membangun 3 Aplikasi tetapi yang dapat terealisasi hanya 2 aplikasi berbasis website diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi Website Kecamatan Selimbau dengan Alamat *Ulr*: kec-selimbau.kapuashulukab.go.id.
2. Aplikasi Website Kecamatan Jongkong dengan Alamat *Ulr*: kec-jongkong.kapuashulukab.go.id.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu pada sub kegiatan tersebut diantaranya adalah:

1. Karena terjadi pemotongan anggaran maka pembangunan 1 (satu) aplikasi dibatalkan.

2. pembangunan dan pengembangan aplikasi masih belum satu pintu di Kelola oleh dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
3. OPD membuat dan mengembangkan aplikasi masing-masing dan tanpa melibatkan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

d. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Melalui Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah bahwa dinas komunikasi berperan penting dalam infrastruktur mengenai jaringan intra dan internet serta jaringan telekomunikasi maka melalui sub kegiatan ini Diskominfo Kab. Kapuas Hulu telah mengusulkan tahun 2021 **sebanyak 203 Akses Internet dan 131 Jaringan telekomunikasi (BTS)** ke Kemeterian Komunikasi dan informatika Republik Indonesia Melalui BAKTI Kominfo.

Untuk tahun 2021 bahwa pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah mendapat bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia berupa **Akses Internet sebanyak 147** yang tersebar di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, sementara untuk **jaringan telekomunikasi (BTS) dari tahun 2020 samapai 2021 belum terealisasi (Belum di bangun).**

Permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu pada sub kegiatan tersebut diantaranya adalah:

1. Data usulan yang di sampaikan yang menjadi syarat usulan sering tidak lengkap;
2. Pemohon dalam menyampaikan kekurangan persyaratan usulan sangat lama;

3. Susahnya menghubungi pihak pemohon;
4. Tidak dapat melakukan survey ke semua lokasi karena keterbatasan anggaran;
5. Pembangunan infrastruktur akses internet dan jaringan telekomunikasi merupakan program Kemeterian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

3. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah diperlukan kesadaran dan partisipasi aktif dari OPD dalam hal penyediaan data statistik sektoral. Dengan data statistik sektoral yang akurat dan berkualitas maka pembangunan akan lebih terarah. Data statistik sektoral yang akurat dan berkualitas dibangun dengan mengarah pada prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.

Dalam melaksanakan penyusunan data statistik sektoral Kabupaten Kapuas Hulu yang akurat dan berkualitas diperlukannya kerja sama dengan OPD sebagai produsen data. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan Tim Penunjang (Admin) Penyusunan Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu di masing-masing OPD. Hal ini bertujuan agar pengumpulan data lebih mudah dilakukan dan lebih efektif dalam memverifikasi dan memvalidasi data statistik sektoral dari tiap OPD. Selain itu, untuk menuju data yang akurat dan berkualitas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik telah membangun Portal Statistik Sektoral yang bertujuan agar data statistik sektoral Kabupaten Kapuas Hulu lebih mudah diakses dan dipergunakan oleh masyarakat luas serta data-data yang dihasilkan lebih mutakhir dan terintegrasi. Namun, dalam penyusunan data statistik sektoral Kabupaten Kapuas Hulu terjadi beberapa kendala sehingga hasil

yang diinginkan belum maksimal. Adapun kendala-kendala yang dihadapi sebagai berikut:

1. Terlambatnya admin OPD dalam menginput dan mengupload data di portal statistik sektoral;
2. Terlambatnya admin OPD mengembalikan form isian data yang mengakibatkan keterlambatan dalam memverifikasi data;
3. Banyaknya data yang tidak saling bersesuaian antara satu instansi dengan instansi yang lain;
4. Belum terbentuknya Forum Satu Data Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga belum ditetapkan data-data prioritas, standar data dan metadata standar yang sesuai dengan prinsip-prinsip satu data;
5. Adanya *refocusing* anggaran karena pandemi Covid-19 sehingga penyusunan data statistik sektoral belum maksimal.

Sementara untuk hasil keluaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Tahun 2021 adalah **1 dokumen** data statistik sektoral yang dicetak sebanyak **100 buku** dan data dihimpun dari **27 OPD, 18 Instansi Vertikal dan 1 BUMD**.

b. Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral

Data yang akurat dan berkualitas merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan keputusan perencanaan sampai dengan evaluasi. Salah satu upaya yang dipenuhi agar data yang dihasilkan oleh tiap OPD akurat dan berkualitas adalah dengan menyajikan metadata. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, memudahkan pencarian, penggunaan serta pengelolaan informasi data. Metadata memberikan informasi tambahan dari kegiatan statistik yang telah dilakukan oleh OPD. Ketika OPD mengeluarkan suatu data, maka metadata memaparkan sebuah informasi tambahan dari data itu seperti deskripsi tentang data tersebut, waktu pengumpulan, konsep dan definisi yang digunakan dan

lainnya. Adapun metadata statistik sektoral terdiri dari 3 jenis metadata, yaitu metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator.

Dalam membangun metadata statistik sektoral, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik berupaya mengoptimalkan Tim Penunjang (Admin) Penyusunan Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu untuk membuat metadata dari data-data yang dihasilkan di masing-masing OPD. Adapun metadata yang dibangun berupa metadata kegiatan statistik yang dilakukan di masing-masing OPD. Metadata kegiatan tersebut berisikan tentang identitas kegiatan, variabel yang dikumpulkan, frekuensi penerbitan, tahun ketersediaan data, cakupan wilayah dan tingkat penyajian yang diharapkan. Namun, dalam membangun metadata statistik sektoral terjadi beberapa kendala sehingga hasil yang diinginkan belum maksimal. Adapun kendala-kendala yang dihadapi sebagai berikut:

- a) Metadata statistik sektoral yang dihimpun hanya berupa metadata kegiatan;
- b) Masih kurangnya pemahaman admin terhadap penyusunan metadata statistik sektoral;
- c) Form metadata yang dibuat belum dalam bentuk baku;
- d) Terlambatnya OPD mengembalikan form metadata yang mengakibatkan keterlambatan dalam penyusunan metadata;
- e) Belum terbentuknya Forum Satu Data Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga belum ditetapkannya data-data prioritas, standar data dan metadata standar yang sesuai dengan prinsip-prinsip satu data;
- f) Adanya *refocusing* anggaran karena pandemi Covid-19 sehingga penyusunan metadata statistik sektoral belum maksimal.

Sementara untuk hasil keluaran Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral Tahun 2021 adalah **1 dokumen** ringkasan metadata statistik sektoral yang dicetak sebanyak **30 buku** dan data dihimpun dari **27 OPD**.

4. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

i. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa urusan pemerintahan terbagi atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan konkuren adalah urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kab/Kota), dimana urusan pemerintahan konkuren itu sendiri terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta urusan pemerintahan pilihan. Pada Pasal 12 ayat 2, persandian itu sendiri termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dalam melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diperlukan sumber daya yang mumpuni, baik sumber daya manusia bidang persandian itu sendiri maupun ketersediaan anggaran yang memadai untuk menunjang urusan persandian.

Adapun hambatan dalam pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Kegiatan persandian digabungkan dalam urusan Seksi Statistik;
2. Belum tersedianya sumber daya manusia di bidang persandian (sandiman);

3. Aplikasi *Barcode* dan *QR Code* untuk tanda tangan elektronik yang digunakan belum tersertifikasi BSrE sehingga untuk sementara hanya digunakan pada surat yang bersifat biasa.
4. Adanya *refocusing* anggaran karena pandemi Covid-19 sehingga belum bisa melaksanakan sosialisasi mengenai keamanan informasi dengan narasumber tim BSrE dari BSSN.

Sementara untuk hasil keluaran Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021 adalah **1 dokumen** Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik.

5. Kegiatan Penetapan Pola Hubung Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pada tahun 2021 urusan persandian pada Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja yaitu tersedianya pemenuhan jasa pendukung telekomunikasi daerah melalui Operasional Pengelolaan Radio Telekomunikasi *Single Side Band* (SSB), merupakan salah satu jaringan komunikasi sandi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang dimanfaatkan sebagai media atau sarana komunikasi dalam pengiriman, penerimaan serta penyampaian berita maupun data dan informasi di 23 Kecamatan.

Adapun hambatan atau permasalahan dalam pelaksanaan Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Kegiatan persandian digabungkan dalam urusan Seksi Statistik;
2. Belum tersedianya sumber daya manusia di bidang persandian (sandiman);
3. Hasil monitoring di 23 Kecamatan, sebagian besar kondisi perangkat Radio Telekomunikasi *Single Side Band* (SSB) sudah tidak layak pakai;
4. Semua perangkat Radio Telekomunikasi *Single Side Band* (SSB) tidak tersertifikasi SDPPI;
5. Belum disetujuinya menggunakan email Sanapati milik BSSN sebagai media komunikasi sandi di Kabupaten Kapuas Hulu.

Sementara untuk hasil keluaran Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021 adalah tersedianya jaringan komunikasi sandi antar perangkat daerah khususnya wilayah kecamatan dan terlaksananya komunikasi sandi yang mudah, sederhana dan lebih aman karena menggunakan bahasa sandi.

6. Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Pada kegiatan pengelolaan media komunikasi publik dapat disampaikan bahwa Dinas Kominfotik Kapuas Hulu sampai dengan saat ini mengelola beberapa media komunikasi dari berbagai platform, diantaranya:

- Radio Rasika 103,4 FM
- Kanal TV Kabel
- Facebook Fanpage
- Instagram
- Kanal Youtube
- Rasika Podcast

- Buletin Online
- Portal Berita Bersama

Dalam pelaksanaan pengelolaan media diatas, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya:

- Tidak tersedianya anggaran peremajaan perangkat radio FM yang mengakibatkan operasional siaran radio harus terhenti pada awal Tahun 2021. Hal ini disebabkan adanya refocusing anggaran yang semula tersedia anggaran peremajaan perangkat secara keseluruhan di Tahun 2020, namun hanya dapat menganggarkan maintenance ringan perangkat radio. Sehingga berdampak pada kerusakan yang menyebabkan siaran radio mati total di awal Tahun 2021.
- Buletin online sampai dengan saat ini belum menggunakan hosting tersendiri, sehingga memiliki keterbatasan dalam merilis jumlah berita dalam setiap edisi. Ketidaktersediaan self hosting untuk bulletin online juga disebabkan minimnya anggaran di Tahun 2021 salah satunya akibat dari refocusing anggaran

Untuk media komunikasi lain tidak memiliki kendala yang bersifat teknis, sehingga tetap dapat beroperasi walaupun dengan keterbatasan sumber daya yang ada.

7. Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

Pada kegiatan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu belum sepenuhnya menerapkan strategi komunikasi dalam pembuatan konten informasi. Hal ini menjadi kendala, mengingat strategi komunikasi sangat dibutuhkan agar pesan pesan yang disampaikan pemerintah daerah kepada khalayak dapat efektif dan efisien. Belum dilakukanya strategi komunikasi

dikarenakan kapasitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kapasitas dan kompetensi dibidang komunikasi belum tersedia. Selain itu, peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan singkat sudah pernah diikuti namun masih dibutuhkan pelatihan teknis lanjutan agar SDM yang dimiliki benar benar memahami dan dapat mengimplementasikan strategi komunikasi dalam perencanaan sebuah konten informasi.

Adapun untuk penyusunan konten informasi saat ini dilakukan melalui pembentukan dan pembinaan contributor berita, baik pada komponen pemerintah daerah maupun pada komponen masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat. Penyusunan konten informasi dengan membentuk contributor OPD dan KIM tentunya menghasilkan jumlah informasi cukup banyak, namun informasi yang disampaikan hanya sebatas informasi kegiatan sehingga pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya terkait dengan kebijakan ataupun konten penanganan krisis belum dapat tercapai.

8. Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik

Memasuki tahun ketiga penggunaan Aplikasi LAPOR di Kabupaten Kapuas Hulu belum menunjukkan keaktifan atau masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan aplikasi tersebut. Hal ini mungkin disebabkan oleh masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui adanya aplikasi LAPOR tersebut.

Dikarenakan keterbatasan dari sisi pembiayaan maka sosialisasi mengenai aplikasi LAPOR tahun 2021 hanya dilakukan dengan cara membagikan X-banner terkait aplikasi LAPOR ke OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan juga ke 23 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu serta sosialisasi melalui media social yang dikelola oleh Dinas komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas hulu.

Jumlah data laporan yang masuk pada aplikasi LAPOR tahun 2021 mencapai 10 laporan, dan semua sudah didisposisikan oleh admin utama ke OPD terkait dan sudah ditindak lanjuti.

9. Pelayanan Informasi Publik

Penyediaan Layanan Informasi dan Dokumentasi merupakan operasional dari pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama yang berada di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

ABerdasarkan hasil visitasi dan pemeringkatan dari Komisi Informasi Daerah Kalimantan Barat, sebagai Layanan Informasi dan Dokumentasi, PPID Kabupaten Kapuas Hulu Pada tahun 2021 tetap berada di zona hijau sebagai Kabupaten Informatif. Sampai dengan Desember 2021 sebanyak 1.867 dokumen informasi publik tersedia di aplikasi ppid.go.id.

Adapun yang masih menjadi kendala yang dihadapi pada kegiatan ini adalah:

- a. Belum tersedianya informasi yang dikecualikan, dimana jenis informasi ini harus disusun dan kemudian ditetapkan melalui Keputusan Bupati. Di tahun 2021 ini telah di lakukan identifikasi informasi awal informasi dikecualikan dan sudah dilakukan verifikasi langsung ke OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dan tahun 2022 direncanakan akan dilaksanakan uji konsekuensi untuk menetapkan informasi dikecualikan.
- b. Di tahun 2021 informasi Publik yang tersedia di aplikasi OPD hanya informasi publik yang berasal dari OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, namun ditahun 2022 akan ditambah informasi publik yang tersedia dikecamatan.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

A. RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategis organisasi. Dengan tujuan ini Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumberdaya manusia, kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya. Tujuan yang ingin dicapai Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik Kabupaten Kapuas Hulu adalah:

- a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- b. Meningkatkan kualitas data Statistik Lintas Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu.

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu adalah indikator kinerja dalam mencapai tujuan periode 2021-2026 yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
- b. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan E-gov
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan informasi publik
- d. Meningkatnya Kualitas data Statistik Sektoral.

Lebih jelas mengenai Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut:

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	Predikat sakip	CC	B	BB	BB	BB	BB
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan E-gov	Indek SPBE	-	1,93	2,60	2,70	2,85	2.86
		Meningkatnya kualitas pelayanan public dan informasi public	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	77	80	82	83
2	Meningkatkan kualitas data statistic lintas sectoral kabupaten Kapuas hulu	Meningkatnya pengelolaan data statistic lintas sectoral Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu yang Valid	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



B. PERJANJIAN KINERJA.

Pernyataan Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh instansi. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahun.

Dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan dengan pernyataan perjanjian kinerja diharapkan dalam mengelola program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu akan lebih baik dan terarah.



Tabel 2.2

PERJANJIAN KINERJA 2021**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK****KABUPATEN KAPUAS HULU**

No	SasaranStrategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	Predikat sakiP	BB
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan E-gov	Indek SPBE	2,85
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan informasi public	Indeks Kepuasan Masyarakat	82
4	Meningkatnya pengelolaan data statistic intas sectoral Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu yang Valid	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

1. Pengukuran Kinerja

a. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indicator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencan}} \times 100\%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indicator kinerja} = \frac{\text{realisasi} - (\text{realisasi} - \text{rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indicator kinerja} = \frac{(2 \times \text{rencana}) - \text{realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada levelsasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- a. 85 s/d 100: SangatBerhasil
- b. $70 \leq X < 85$: Berhasil
- c. $55 \leq X < 70$: CukupBerhasil
- d. < 55 : TidakBerhasil

Untuk mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama. Dengan demikian kinerja utama tertuang dalam tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 yaitu dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	Predikat sakip	BB	BB	100%
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan E-gov	Indek SPBE	2,85	2,36	83%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan informasi public	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	82,72	101%
4	Meningkatnya pengelolaan data statistic lintas sectoral Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu yang Valid	100 %	100%	100%

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Pemerintah Kab. Kapuas Hulu pada beberapa table di bawah ini:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Capaian Kinerja	Jumlah IKU	Persentase
1	Sangat Berhasil	1	101%
2	Berhasil	2	100 %
3	Cukup Berhasil	-	-
4	Tidak Berhasil	1	83%
5	Belum Ada Nilai	-	-

Dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, capaian kinerja sangat berhasil 1 (Satu) dengan capaian 101%, 2 (Dua) berhasil dengan capaian 100% dan Tidak berhasil Nilai 1 (satu) dengan capaian 83%.

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Capaian Kinerja	Jumlah sasaran	Persentase
1	Sangat Berhasil	1	101%
2	Berhasil	2	100 %
3	Cukup Berhasil	-	-
4	Tidak Berhasil	1	83 %

Dari 4 (empat) sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, capaian kinerja sangat berhasil 1 (Satu) sasaran dengan capaian sebesar 101%, 2

(Dua) berhasil dengan capaian 100% dan tidak berhasil Nilai 1 (satu) dengan capaian 83%.

2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran1: Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Sasaran “Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik” bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk tanggungjawab atas penggunaan anggaran serta peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja OPD. Adapun nilai (skor) akuntabilitas kinerja OPD berdasarkan evaluasi penyelenggaraan Laporan Kinerja yang dilaksanakan Oleh Inspektorat daerah untuk Tahun 2021 belum keluar.

Capaian Kinerja sasaran “Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pada berbagai tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Kinerja sasaran 1
Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2020 yang di nilai di Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Predikat SAKIP	%	BB	BB	100
	Capaian sasaran (100%)				

Tabel 3.5
Analisis pencapaian Kinerja Sasaran 1
Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2017			2018			2019			2020			2021		
		TARGET	Realisasi	%	TARGET	Realisasi	%	TARGET	Realisasi	%	TARGET	Realisasi	%	TARGET	Realisasi	%
1.	Predikat SAKIP	CC	CC	100	B	BB	100	BB	BB	100	BB	BB	100	BB	-	-

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1
Dibandingkan Dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis (Renstra)

NO	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2021	Tingkat Kemajuan
1	Predikat SAKIP	BB	-	-

Capaian kinerja sasaran ini ditunjukkan pada capaian indikator kinerja sasaran diatas secara ringkas diuraikan berikut ini:

Indikator: Predikat SAKIP

Penyelenggaraan SAKIP Dinas Kominfo, Informatika dan Statistik Kab. Kapuas Hulu berdasarkan evaluasi Inspektorat Tahun 2017 mendapat predikat **CC (59,06 poin)** sesuai dengan target yang ditetapkan dengan capaian sasaran 100% dan pada Tahun 2018 target predikat SAKIP OPD B, hasil predikat yang di peroleh adalah **BB (72,90 poin)**, dan Penyelenggaraan SAKIP pada Dinas Kominfo, Informatika dan Statistik Kab. Kapuas Hulu berdasarkan pada tahun 2019 atas mempertahankan target nilai perolehan SAKIP OPD BB, Dinas Kominfo,

Informatika dan Statistik Kab. Kapuas Hulu pada Tahun 2019 telah mendapatkan hasil predikat yang diperoleh adalah **BB (73,92 poin)**.

Dinas Kominfo, Informatika dan Statistik Kab. Kapuas Hulu untuk tahun 2020 menargetkan Predikat SAKIP BB dan setelah Laporan hasil evaluasi SAKIP dengan Nomor: 700/083/LHE/INKAB/IB4 pada tanggal 6 Juli 2021 dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu mengeluarkan Predikat SAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan hasil **BB (74,42 poin)**.

Nilai BB yang didapat ini mencerminkan bahwa Renstra yang disusun dengan baik, Akuntabel, indikator pencapaian kinerja yang jelas dan terukur, evaluasi atas program dan kinerja telah dilakukan, serta capaian target indikator juga tercapai, Adapun kekurangan yang diminta kepada Dinas Kominfo, Informatika dan Statistik dengan melakukan studi perbandingan nilai dengan beberapa OPD pada tahun 2020 yang diantaranya; Dinas Komunikasi dan Informatika daerah Prov. Kalimantan Barat dengan nilai SAKIP yang diperoleh pada tahun 2020 ialah (75,50 Poin) terlampir (lampiran 5) dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kubu Raya dengan nilai SAKIP yang diperoleh pada tahun 2020 ialah (74,47 Poin) terlampir (lampiran 6)

Berdasarkan hasil nilai BB yang di peroleh oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab.Kapuas Hulu dan juga penyampaian kekurangan data yang disampaikan oleh inspektorat kab. Kapuas hulu pada SAKIP 2020 yang telah dilengkapi oleh Dinas Kominfo, Informatika dan Statistik kab. Kapus hulu dapat membantu untuk tahun 2021 bisa menargetkan mempertahankan nilai BB dengan melengkapi kekurangan dokumen yang diperlukan apabila belum lengkap.

Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaran E-gov

Pelaksanaan pada Sub Kegiatan Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-Government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupate/Kota adalah melaksanakan evaluasi mandiri SPBE Kabupaten Kapuas Hulu yang telah disampaikan ke

kementrian PANRB republic Indonesia untuk dinilai. Ada terdapat 26 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang dievaluasi terkait penerapan SPBE.

Indikator: Indek SPBE

Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government) Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan evaluasi SPBE tahun 2018 memiliki nilai **indek SPBE 1,93** dengan predikat **CUKUP**, Untuk tahun 2019 hasil evaluasi **Indeks SPBE** Kabupaten Kapuas Hulu mendapat **nilai 2,60** dengan predikat **BAIK**, dan pada tahun 2020 hasil evaluasi **Indeks SPBE** Kabupaten Kapuas Hulu Kembali mendapat **nilai 2,60** dengan predikat **BAIK**. Adapun target yang diinginkan pada tahun 2021 hasil dari **evaluasi indeks SPBE** Kabupaten Kapuas Hulu mendapatkan nilai **2,36** terdapat penurunan nilai pada tahun sebelumnya dan mendapatkan predikat **CUKUP**. Walaupun belum memenuhi target 2,85 dan terjadi penurunan nilai pada evaluasi SPBE Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 dikarenakan terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi pada saat penilaian, termasuk dengan keterbatasan anggaran yang menyebabkan belum bisa melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan nilai SPBE dan masalah yang lainnya. Dengan ini dapat menjadi tinjauan Kembali agar Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dapat mendapatkan nilai Evaluasi Baik Kembali. (Lampiran 7)

Sasaran 3: Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan informasi public

Sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada penerima pelayanan publik.

Capaian Kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan public dan informasi public” dapat dilihat dari capaian indicator kinerja pada berbagai table di bawah ini:

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Kinerja sasaran 3
Meningkatnyakualitaspelayanan public dan informasi public

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	82	82,72	101
Capaian sasaran Sangat Berhasil (101%)					

Tabel 3.8
Analisispencapaian Kinerja Sasaran 3
Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikat or Kinerja	2017			2018			2019			2020			2021		
		Tar get	Re alis asi	%	Tar get	Re alis asi	%	Tar get	Re alis asi	%	Tar get	Reali sasi	%	Tar get	Reali sasi	%
1.	Indeks Kepuas an Masyar akat	-	-	-	-	-	-	-	77	100	80	81,83	102	82	82,72	101

Indikato: Indeks Kepuasan Masyarakat

Realisasi kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat baru pada Tahun 2021 dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan menyebarkan survey secara daring/online kepublik di Kab. Kapuas Hulu dengan hasil nilai 82,72 predikat mutu pelayanan BAIK di atas target. Capaian tersebut dapat dilihat pada (lampiran 8).

Sasaran 4: Meningkatnya pengelolaan data statistik lintas sectoral Kabupaten Kapuas Hulu.

Data statistic sectoral kab. Kapuas hulu yang di sajikan sebagai data indicator dalam mendukung pembangunan daerah, evaluasi dan pelaporan dengan kegiatan ini dapat memberikan manfaat untuk OPD dalam hal penyediaan data statistic sectoral. Dengan data statistic sectoral yang akurat dan berkualitas maka pembangunan akan lebih terarah. Data statistic sectoral yang akurat dan berkualitas dibangun dengan mengarah pada prinsip Satu Data Indonesia.

Publikasi Data Statistik Sektoral Kab. Kapuas Hulu tahun 2021 dapat dipergunakan oleh seluruh OPD bertujuan agar pengumpulan data lebih mudah dilakukan dan lebih efektif dalam memverifikasi dan memvalidasi data statistik sektoral dari tiap OPD. Selain itu, untuk menuju data yang akurat dan berkualitas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik telah membangun Portal Statistik Sektoral dengan tujuan agar data statistik sektoral Kabupaten Kapuas Hulu lebih mudah untuk diakses dan dipergunakan oleh masyarakat luas serta data-data yang dihasilkan lebih mutakhir dan terintegrasi.

Capaian Kinerja sasaran “Meningkatnya pengelolaan data statistik Lintas sektoral Kabupaten Kapuas Hulu.” Dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pada berbagai tabel di bawah ini:

Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 4
Meningkatnya pengelolaan data statistik sektoral
Kabupaten Kapuas Hulu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu yang Valid	%	100%	100%	100%
Capaian sasaran Berhasil (100%)					

Tabel 3.10
Analisis pencapaian Kinerja Sasaran 4
Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2017			2018			2019			2020			2021		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Persentase Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu yang Valid	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.11
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 4
Dibandingkan Dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis (Renstra)

NO	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2021	Tingkat Kemajuan
1	Persentase Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu yang Valid	100%	100%	100%

Capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan sebesar 100% dikategorikan Berhasil. Capaian kinerja sasaran ini ditunjukkan pada capaian indikator kinerja sasaran diatas secara ringkas diuraikan berikut ini:

Indikator: Persentase data statistic sektoral Kab. Kapuas Hulu yang valid

Realisasi kinerja Indikator Persentase kompilasi ketersediaan data statistic lintas sektoral Kab. Kapuas Hulu Tahun 2021 sebesar 100%. Realisasi kinerja tersebut sesuai dengan target yang di tetapkan sebesar 100%.

Realisasi kinerja indikator Persentase kompilasi ketersediaan data statistik lintas sektoral Kab. Kapuas Hulu Tahun 2021 sama dengan realisasi kinerja tahun 2020 sebesar 100%. Hasil keluaran kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Tahun 2021 adalah **1 dokumen** data statistik sektoral yang dicetak sebanyak **100 buku** dan data dihimpun dari **27 OPD, 18 Instansi Vertikal** dan **1 BUMD**.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun Anggaran 2021 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu mengalami perubahan anggaran terkait dengan terjadinya pandemic COVID-19, Yaitu ;

1. Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni sebesar Rp. **4,569,315,456** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. **1,918,002,298** dan Belanja Langsung sebesar Rp. **2,651,313,158**.
2. Selanjutnya APBD Penyempurnaan/Perubahan COVID-19 anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp. **4,310,185,608.00**. yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. **1,917,487,298.00**. dan Belanja Langsung sebesar Rp. **2,392,698,310.00**.
3. Pada akhir tahun anggaran, APBD-P Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu terealisasi sebesar Rp. **4.543.115.493,00** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. **1.899.225.556,00** dan Belanja Langsung sebesar Rp. **2.643.889.937,00**.

Perubahan anggaran dari APBD ke APBD-P berkurang sebesar Rp. 11,353,521.00 (-0,25%) yang terdiri dari Anggaran Belanja Tidak Langsung mengalami pengurangan sebesar Rp. 18,776,742.00 (-0,98%) dan Anggaran Belanja Langsung mengalami pengurangan sebesar Rp. 7,423,221.00 (-0,28%).

Pada akhir Tahun Anggaran 2021 Persentase anggaran sebesar 97,85%, persentase Belanja Tidak Langsung sebesar 99,38% dan Belanja Langsung sebesar 95.73 %. Untuk Belanja Langsung Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu terbagi dalam 13 program dan 45 kegiatan (42 kegiatan berjalan, 3 kegiatan tidak berjalan Karena pemotongan anggaran Covid-19).

1. Realisasi Belanja

a. Tidak Langsung

Realisasi belanja langsung Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Realisasi Belanja Tidak Langsung

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4,800,000.00	4,800,000.00	100.00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4,800,000.00	4,800,000.00	100.00
	Belanja Honorarium Pengurus/ Penyimpan Barang	4,800,000.00	4,800,000.00	100.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,599,145,556.00	1,547,184,571.00	96.75
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1,113,642,169.00	1,078,774,651.00	96.87
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	769,641,889.00	748,767,800.00	97.29
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1,596,755.00	1,539,583.00	96.42
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4,790,275.00	4,618,753.00	96.42
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	56,116,713.00	51,823,925.00	92.35
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	11,029.00	10,735.00	97.33
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	53,380,782.00	51,707,880.00	96.87



	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	19,970,000.00	17,840,000.00	89.33
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12,352,500.00	12,325,000.00	99.78
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan unjangan]	106,308,250.00	103,670,000.00	97.52
	Penyediaan Gaji dan unjangan ASN	88,246,757.00	85,250,762.00	96.60
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1,227,219.00	1,220,213.00	99.43
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	485,503,387.00	468,409,920.00	96.48
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	485,503,387.00	468,409,920.00	96.48
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	180,600,000.00	154,080,000.00	85.32
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	180,600,000.00	154,080,000.00	85.32
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	180,600,000.00	154,080,000.00	85.32
	Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,280,000.00	680,000.00	53.13
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1,280,000.00	680,000.00	53.13
	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1,280,000.00	680,000.00	53.13
	Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1,280,000.00	680,000.00	53.13
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1,280,000.00	680,000.00	53.13
	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1,280,000.00	680,000.00	53.13



	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,280,000.00	680,000.00	53.13
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1,280,000.00	680,000.00	53.13
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1,280,000.00	680,000.00	53.13
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,280,000.00	680,000.00	53.13
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1,280,000.00	680,000.00	53.13
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1,280,000.00	680,000.00	53.13
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Media Komunikasi Publik	25,190,000.00	25,190,000.00	100.00
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat	25,190,000.00	25,190,000.00	100.00
	<i>Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar</i>	25,190,000.00	25,190,000.00	100.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67,540,000.00	67,440,000.00	99.85
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	11,440,000.00	11,440,000.00	100.00
	<i>Belanja Modal Alat Rumah Tangga</i>	5,390,000.00	5,390,000.00	100.00
	<i>Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya</i>	6,050,000.00	6,050,000.00	100.00
	Belanja Modal Komputer	56,100,000.00	56,000,000.00	99.82



	Belanja Modal Komputer	56,100,000.00	56,000,000.00	99.82
	Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16,830,000.00	16,800,000.00	99.82
	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	12,430,000.00	12,400,000.00	99.76
	Belanja Modal Alat Kantor	5,610,000.00	5,600,000.00	99.82
	Belanja Pinger Prin (Mesin Absen)	5,610,000.00	5,600,000.00	99.82
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4,345,000.00	4,340,000.00	99.88
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4,345,000.00	4,340,000.00	99.88
	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	2,475,000.00	2,460,000.00	99.39
	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	2,475,000.00	2,460,000.00	99.39
	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4,400,000.00	4,400,000.00	100.00
	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	4,400,000.00	4,400,000.00	100.00
	TOTAL	1,899,225,556.00	1,818,214,571.00	95.73

b. Belanja Langsung

Tabel 3.13
Realisasi Belanja Langsung

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
I	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	71,587,500.00	71,587,200.00	100.00
	Belanja Barang	12,787,500.00	12,787,200.00	100.00
	Belanja Barang Pakai Habis			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5,940,000.00	5,940,000.00	100.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,877,500.00	3,877,200.00	99.99
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,650,000.00	1,650,000.00	100.00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,320,000.00	1,320,000.00	100.00
	Belanja Jasa	58,800,000.00	58,800,000.00	100.00
	Belanja Jasa Kantor			
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	58,800,000.00	58,800,000.00	100.00
II	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25,714,040.00	25,706,200.00	99.97
	Belanja Barang	25,714,040.00	25,706,200.00	99.97
	Belanja Barang Pakai Habis			



	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10,313,600.00	10,312,400.00	99.99
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7,480,440.00	7,480,200.00	100.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2,640,000.00	2,640,000.00	100.00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,280,000.00	5,273,600.00	99.88
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	47,350,200.00	47,289,100.00	99.87
	Belanja Barang	9,550,200.00	9,489,100.00	99.36
	Belanja Barang Pakai Habis			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,665,200.00	3,664,600.00	99.98
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4,565,000.00	4,564,500.00	99.99
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,320,000.00	1,260,000.00	95.45
	Belanja Jasa	37,800,000.00	37,800,000.00	100.00
	Belanja Jasa Kantor			
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	29,400,000.00	29,400,000.00	100.00
	Belanja Jasa Operator Aplikasi Absen OPD	8,400,000.00	8,400,000.00	100.00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1,320,000.00	1,320,000.00	100.00
	Belanja Jasa	1,320,000.00	1,320,000.00	100.00
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1,320,000.00	1,320,000.00	100.00



	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan			
	Belanja Bimbingan Teknis	1,320,000.00	1,320,000.00	100.00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	0.00
	Belanja Barang	-		0.00
	Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi	-		0.00
III	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20,689,900.00	20,601,600.00	99.57
	Belanja Barang	12,289,900.00	12,201,600.00	99.28
	Belanja Barang Pakai Habis			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5,940,700.00	5,852,600.00	98.52
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4,699,200.00	4,699,000.00	100.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	330,000.00	330,000.00	100.00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,320,000.00	1,320,000.00	100.00
	Belanja Jasa	8,400,000.00	8,400,000.00	
	Belanja Jasa Kantor			
	Operator SIPKD	8,400,000.00	8,400,000.00	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	37,419,000.00	37,418,800.00	100.00
	Belanja Barang	8,019,000.00	8,018,800.00	100.00



	Belanja Barang Pakai Habis			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4,884,000.00	4,884,000.00	100.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,135,000.00	3,134,800.00	99.99
	Belanja Jasa	29,400,000.00	29,400,000.00	
	Belanja Jasa Kantor			
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	29,400,000.00	29,400,000.00	100.00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45,850,400.00	45,830,000.00	99.96
	Belanja Barang	15,250,400.00	15,230,000.00	99.87
	Belanja Barang Pakai Habis			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6,890,400.00	6,890,000.00	99.99
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7,040,000.00	7,040,000.00	100.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,320,000.00	1,300,000.00	98.48
	Belanja Jasa	30,600,000.00	30,600,000.00	100.00
	Belanja Jasa Kantor			
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	30,600,000.00	30,600,000.00	100.00
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	36,608,000.00	36,600,000.00	99.98
	Belanja Barang	36,608,000.00	36,600,000.00	
	Belanja Barang Pakai Habis			
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	36,608,000.00	36,600,000.00	99.98



	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	23,760,000.00	23,740,000.00	99.92
	Belanja Barang	19,560,000.00	19,540,000.00	99.90
	Belanja Barang Pakai Habis			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,443,000.00	1,440,000.00	99.79
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17,127,000.00	17,110,000.00	99.90
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	990,000.00	990,000.00	100.00
	Belanja Jasa	4,200,000.00	4,200,000.00	100.00
	Belanja Jasa Kantor			
	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	4,200,000.00	4,200,000.00	100.00
	Penyediaan Bahan/Material	-	-	
	Belanja Barang	-		
	Belanja Barang Pakai Habis			
	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	-	
	Belanja Jasa	-		
	Belanja Jasa Kantor			
	Belanja Jasa Upah Pekerja Pembuatan Gerbang (Hias Gerbang Hut RI 17 Agustus)	-	-	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	70,180,000.00	70,180,000.00	100.00
	Belanja Barang	70,180,000.00	70,180,000.00	100.00
	Belanja Barang Pakai Habis			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	70,180,000.00	70,180,000.00	100.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,738,000.00	1,738,000.00	100.00
	Belanja Barang	1,738,000.00	1,738,000.00	100.00



	Belanja Barang Pakai Habis			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	528,000.00	528,000.00	100.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,210,000.00	1,210,000.00	100.00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4,543,000.00	4,538,000.00	99.89
	Belanja Barang	4,543,000.00	4,538,000.00	99.89
	Belanja Barang Pakai Habis			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	528,000.00	528,000.00	100.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	715,000.00	710,000.00	99.30
	Belanja bahan Pembersih tangan kantor (Wastapel 1 Paket)	3,300,000.00	3,300,000.00	100.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	257,675,800.00	257,630,648.00	99.98
	Belanja Barang	3,418,800.00	3,405,000.00	99.60
	Belanja Barang Pakai Habis			
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,418,800.00	3,405,000.00	99.60
	Belanja Perjalanan Dinas	254,257,000.00	254,225,648.00	99.99
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	140,257,000.00		0.00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	140,257,000.00	140,235,648.00	99.98
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	114,000,000.00		0.00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	114,000,000.00	113,990,000.00	99.99
V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah			



	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57,750,000.00	57,700,000.00	99.91
	Belanja Barang dan jasa	7,425,000.00	7,400,000.00	99.66
	Belanja Barang Pakai Habis			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7,425,000.00	7,400,000.00	99.66
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4,125,000	4,100,000	99.39
	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio Peralatan Studio Video dan Film	4,125,000	4,100,000	99.39
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	46,200,000.00	46,200,000.00	100.00
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	15,950,000.00	15,950,000.00	100.00
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Peralatan Mainframe	30,250,000.00	30,250,000.00	100.00
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199,903,000.00	199,588,480.00	99.84
	Belanja Barang	1,903,000.00	1,903,000.00	100.00
	Belanja Barang Pakai Habis			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	528,000.00	528,000.00	100.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	715,000.00	715,000.00	100.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	660,000.00	660,000.00	100.00



	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	198,000,000.00	197,685,480.00	99.84
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Kantor	198,000,000.00	197,685,480.00	99.84
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-		#DIV/0!
	Belanja Barang dan Jasa			#DIV/0!
	Belanja Barang	-		
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	126,257,505.00	125,391,800.00	99.31
	Belanja Barang	97,894,500.00	97,727,100.00	99.83
	Belanja Barang Pakai Habis			
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	45,094,500.00	44,927,100.00	99.63
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	52,800,000.00	52,800,000.00	100.00
	Belanja Jasa	2,475,000.00	1,784,700.00	72.11
	Belanja Jasa Kantor			
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2,475,000.00	1,784,700.00	72.11
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25,888,005.00	25,880,000.00	99.97
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	25,888,005.00	25,880,000.00	99.97
VI	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			



	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	156,109,000.00	148,711,989.00	95.26
	Belanja Barang	3,663,000.00	3,580,000.00	97.73
	Belanja Barang Pakai Habis			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,738,000.00	1,730,000.00	99.54
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	825,000.00	750,000.00	90.91
	Belanja Jasa	116,450,000.00	109,550,000.00	94.07
	Belanja Jasa Kantor			
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	97,700,000.00	90,800,000.00	92.94
	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	18,750,000.00	18,750,000.00	100.00
	Belanja Perjalanan Dinas	35,996,000.00	35,581,989.00	98.85
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15,996,000.00		0.00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15,996,000.00	15,586,989.00	97.44
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20,000,000.00		0.00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20,000,000.00	19,995,000.00	99.98
VII	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	57,593,100.00	56,991,141.00	98.95
	Belanja Barang	8,514,100.00	8,393,000.00	98.58
	Belanja Barang Pakai Habis			



	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,794,100.00	1,793,000.00	99.94
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	660,000.00	660,000.00	100.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,320,000.00	1,200,000.00	90.91
	makan minum rapat	4,740,000.00	4,740,000.00	100.00
	Belanja Jasa	21,250,000.00	21,250,000.00	100.00
	Belanja Jasa Kantor			
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	21,250,000.00	21,250,000.00	100.00
	Belanja Perjalanan Dinas	27,829,000.00	27,348,141.00	98.27
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27,829,000.00		0.00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27,829,000.00	27,348,141.00	98.27
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	70,618,800.00	70,298,000.00	99.55
	Belanja Barang	4,968,800.00	4,833,000.00	97.27
	Belanja Barang Pakai Habis			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,383,800.00	1,383,000.00	99.94
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	660,000.00	660,000.00	100.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,485,000.00	1,350,000.00	90.91
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,440,000.00	1,440,000.00	100.00
	Belanja Jasa	58,250,000.00	58,085,000.00	99.72
	Belanja Jasa Kantor			



	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	50,600,000.00	50,435,000.00	99.67
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	7,650,000.00	7,650,000.00	100.00
	Belanja Perjalanan Dinas	7,400,000.00	7,380,000.00	99.73
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,400,000.00		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,400,000.00	7,380,000.00	99.73
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	49,257,400.00	48,108,253.00	97.67
	Belanja Barang	3,898,400.00	3,762,400.00	96.51
	Belanja Barang Pakai Habis			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,753,400.00	1,752,400.00	99.94
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	660,000.00	660,000.00	100.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,485,000.00	1,350,000.00	90.91
	Belanja Jasa	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00
	Belanja Jasa Kantor			
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00
	Belanja Perjalanan Dinas	37,359,000.00	36,345,853.00	97.29
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13,109,000.00		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13,109,000.00	12,170,853.00	92.84
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24,250,000.00		



	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24,250,000.00	24,175,000.00	99.69
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	26,512,400.00	26,496,800.00	99.94
	Belanja Barang	2,912,400.00	2,896,800.00	99.46
	Belanja Barang Pakai Habis			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,247,400.00	1,246,800.00	99.95
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	660,000.00	660,000.00	100.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	165,000.00	150,000.00	90.91
	Belanja Makanan dan Minuman Rapa	840,000.00	840,000.00	100.00
	Belanja Jasa	23,600,000.00	23,600,000.00	100.00
	Belanja Jasa Kantor			
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	23,600,000.00	23,600,000.00	100.00
VIII	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	66,573,840.00	66,473,600.00	99.85
	Belanja Barang	31,373,840	31,373,600	100.00
	Belanja Barang Pakai Habis			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,223,840.00	2,223,600.00	99.99
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	27,500,000.00	27,500,000.00	100.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,650,000	1,650,000.00	100.00
	Belanja Jasa	14,400,000.00	14,400,000.00	100.00
	Belanja Jasa Kantor			



	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	14,400,000.00	14,400,000.00	100.00
	Belanja Perjalanan Dinas	20,800,000.00	20,700,000.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20,800,000.00		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20,800,000.00	20,700,000.00	99.52
	Pelayanan Informasi Publik	81,793,300.00	81,289,292.00	99.38
	Belanja Barang	10,813,300.00	10,692,800.00	98.89
	Belanja Barang Pakai Habis			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5,093,300.00	5,092,800.00	99.99
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4,400,000.00	4,400,000.00	100.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,320,000.00	1,200,000.00	90.91
	Belanja Jasa	28,800,000.00	28,800,000.00	100.00
	Belanja Jasa Kantor			
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	24,000,000.00	24,000,000.00	100.00
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	4,800,000.00	4,800,000.00	100.00
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13,750,000.00	13,750,000.00	100.00
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	13,750,000.00	13,750,000.00	100.00
	Belanja Perjalanan Dinas	28,430,000.00	28,046,492.00	98.65
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			0.00



		22,080,000.00		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22,080,000.00	21,741,492.00	98.47
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,350,000.00		0.00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,350,000.00	6,305,000.00	99.29
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	216,117,000.00	214,966,000.00	99.47
	Belanja Barang	3,387,000.00	3,336,000.00	98.49
	Belanja Barang Pakai Habis			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,638,000.00	1,636,000.00	99.88
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,749,000.00	1,700,000.00	97.20
	Belanja Jasa	186,580,000.00	185,580,000.00	99.46
	Belanja Jasa Kantor			
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	102,800,000.00	101,800,000.00	99.03
	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	62,400,000.00	62,400,000.00	100.00
	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	21,380,000.00	21,380,000.00	100.00
	Belanja Perjalanan Dinas	26,150,000.00	26,050,000.00	99.62
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26,150,000.00		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26,150,000.00	26,050,000.00	99.62
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	223,734,900.00	222,139,234.00	99.29
	Belanja Barang	5,301,900.00	5,225,000.00	98.55
	Belanja Barang Pakai Habis			



	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,826,900.00	2,825,000.00	99.93
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,650,000.00	1,650,000.00	100.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	825,000.00	750,000.00	90.91
	Belanja Jasa	190,920,000.00	190,920,000.00	100.00
	Belanja Jasa Kantor			
	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	24,000,000.00	24,000,000.00	100.00
	Honorarium Tim Penyusun Buletin	17,520,000.00	17,520,000.00	100.00
	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	149,400,000.00	149,400,000.00	100.00
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8,800,000.00	8,800,000.00	100.00
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	8,800,000.00	8,800,000.00	100.00
	Belanja Perjalanan Dinas	16,550,000.00	16,500,000.00	99.70
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16,550,000.00		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16,550,000.00	16,500,000.00	99.70
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,163,000.00	694,234.00	32.10
	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF	2,163,000.00	694,234.00	32.10
IX	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			



	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	108,866,700.00	108,636,598.00	99.79
	Belanja Barang	5,748,700.00	5,613,600.00	97.65
	Belanja Barang Pakai Habis			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,163,700.00	2,163,600.00	100.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	660,000.00	660,000.00	100.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,485,000.00	1,350,000.00	90.91
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,440,000.00	1,440,000.00	100.00
	Belanja Jasa	55,600,000.00	55,600,000.00	100.00
	Belanja Jasa Kantor			
	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	30,600,000.00	30,600,000.00	100.00
	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13,200,000.00	13,200,000.00	100.00
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	13,200,000	13,200,000.00	100.00
	Belanja Perjalanan Dinas	34,318,000.00	34,222,998.00	99.72
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8,400,000.00		



	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8,400,000.00	8,305,000.00	98.87
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	25,918,000.00		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	25,918,000.00	25,917,998.00	100.00
	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	23,593,612.00	23,547,812.00	99.81
	Belanja Barang	4,606,800.00	4,561,000.00	99.01
	Belanja Barang Pakai Habis			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,461,800.00	2,461,000.00	99.97
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2,145,000.00	2,100,000.00	97.90
	Belanja Jasa	12,800,812.00	12,800,812.00	100.00
	Belanja Jasa Kantor			
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5,300,812.00	5,300,812.00	100.00
	Belanja Perjalanan Dinas	6,186,000.00	6,186,000.00	100.00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,186,000.00		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,186,000.00	6,186,000.00	100.00
X	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73,940,000.00	73,141,118.00	98.92
	Belanja Jasa	73,940,000.00	73,141,118.00	98.92
	Belanja Jasa Kantor			
	Belanja Tagihan Air			99.26



		7,040,000.00	6,988,200.00	
	Belanja Tagihan Listrik	26,400,000.00	26,354,975.00	99.83
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	40,500,000.00	39,797,943.00	98.27
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	80,440,700.00	80,438,000.00	100.00
	Belanja Barang	44,392,700.00	44,390,000.00	99.99
	Belanja Barang Pakai Habis			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	11,192,500.00	11,190,000.00	99.98
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	28,030,200.00	28,030,000.00	100.00
	Belanja Obat-Obatan-Obat- Obat-Obatan Lainnya	5,170,000.00	5,170,000.00	100.00
	Belanja Jasa	11,748,000.00	11,748,000.00	100.00
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi			
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	11,748,000.00	11,748,000.00	100.00
	Belanja Jasa Kantor	24,300,000.00	24,300,000.00	100.00
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	9,600,000.00	9,600,000.00	100.00
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	14,700,000.00	14,700,000.00	100.00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,296,200.00	8,290,000.00	99.93
	Belanja Barang	8,296,200.00		0.00
	Belanja Barang Pakai Habis			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8,296,200.00	8,290,000.00	99.93
XI	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			



	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	34,106,300.00	33,714,282.00	98.85
	Belanja Barang	3,534,300.00	3,458,400.00	97.85
	Belanja Barang Pakai Habis			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,609,300.00	1,608,400.00	99.94
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	825,000.00	750,000.00	90.91
	Belanja Jasa	18,200,000.00	18,200,000.00	100.00
	Belanja Jasa Kantor			
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18,200,000.00	18,200,000.00	100.00
	Belanja Perjalanan Dinas	12,372,000.00	12,055,882.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12,372,000.00		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12,372,000.00	12,055,882.00	97.44
XII	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	161,586,240.00	161,233,309.00	99.78
	Belanja Barang	37,926,240.00	37,780,000.00	99.61
	Belanja Barang Pakai Habis			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,618,440.00	2,618,200.00	99.99
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	28,542,800.00	28,531,800.00	99.96
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,485,000.00	1,350,000.00	90.91



	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,280,000.00	5,280,000.00	100.00
	Belanja Jasa	95,200,000.00	95,200,000.00	100.00
	Belanja Jasa Kantor			
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	36,400,000.00	36,400,000.00	100.00
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	58,800,000.00	58,800,000.00	100.00
	Belanja Perjalanan Dinas	28,460,000.00	28,253,309.00	99.27
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,360,000.00		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,360,000.00	7,193,309.00	97.74
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21,100,000.00		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21,100,000.00	21,060,000.00	99.81
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	41,517,600.00	41,170,201.00	99.16
	Belanja Barang	12,745,600.00	12,555,700.00	98.51
	Belanja Barang Pakai Habis			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,480,600.00	1,471,000.00	99.35
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8,580,000.00	8,546,700.00	99.61
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,485,000.00	1,350,000.00	90.91
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,200,000.00	1,188,000.00	99.00
	Belanja Jasa	16,400,000.00	16,400,000.00	100.00
	Belanja Jasa Kantor			
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16,400,000.00	16,400,000.00	100.00
	Belanja Perjalanan Dinas	12,372,000.00	12,214,501.00	98.73



	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12,372,000.00		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12,372,000.00	12,214,501.00	98.73
XIII	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,207,500.00	4,207,500.00	100.00
	Belanja Barang	4,207,500.00	4,207,500.00	100.00
	Belanja Barang Pakai Habis			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,485,000.00	1,485,000.00	100.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,402,500.00	1,402,500.00	100.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	330,000.00	330,000.00	100.00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	990,000.00	990,000.00	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7,232,500.00	7,232,500.00	100.00
	Belanja Barang	7,232,500.00	7,232,500.00	100.00
	Belanja Barang Pakai Habis			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,997,500.00	2,997,500.00	100.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2,255,000.00	2,255,000.00	100.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,980,000.00	1,980,000.00	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,207,500.00	4,207,500.00	100.00
	Belanja Barang	4,207,500.00	4,207,500.00	100.00
	Belanja Barang Pakai Habis			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,485,000.00	1,485,000.00	100.00



	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,402,500.00	1,402,500.00	100.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	330,000.00	330,000.00	100.00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	990,000.00	990,000.00	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	4,207,500.00	4,207,500.00	100.00
	Belanja Barang	4,207,500.00	4,207,500.00	100.00
	Belanja Barang Pakai Habis			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,485,000.00	1,485,000.00	100.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,402,500.00	1,402,500.00	100.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	330,000.00	330,000.00	100.00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	990,000.00	990,000.00	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,207,500.00	4,207,500.00	100.00
	Belanja Barang	4,207,500.00	4,207,500.00	100.00
	Belanja Barang Pakai Habis			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,485,000.00	1,485,000.00	100.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,402,500.00	1,402,500.00	100.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	330,000.00	330,000.00	100.00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	990,000.00	990,000.00	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7,232,500.00	7,232,500.00	100.00
	Belanja Barang			100.00



		7,232,500.00	7,232,500.00	
	Belanja Barang Pakai Habis			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,997,500.00	2,997,500.00	100.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2,255,000.00	2,255,000.00	100.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,980,000.00	1,980,000.00	100.00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	103,591,500.00	103,591,500.00	100.00
	Belanja Barang	12,391,500.00	12,391,500.00	100.00
	Belanja Barang Pakai Habis			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,931,500.00	2,931,500.00	100.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5,665,000.00	5,665,000.00	100.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,815,000.00	1,815,000.00	100.00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,980,000.00	1,980,000.00	100.00
	Belanja Jasa	91,200,000.00	91,200,000.00	100.00
	Belanja Jasa Kantor			
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	91,200,000.00	91,200,000.00	100.00
	TOTAL	2,643,889,937.00	2,627,391,957.00	99.38



Tabel 3.14

Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Anggaran Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERKEMBANGAN REALISASI KINERJA				CAPAIAN KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN					
				REALISASI TW 1	REALISASI TW 2	REALISASI TW 3	REALISASI TW 4			ANGGARAN	REALISASI TW 1	REALISASI TW 2	REALISASI TW 3	REALISASI TW 4	%
1	Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik	Predikat SAKIP	BB			BB	-	100% (hasil nilai sakiptahun 2020 yang dinilai di tahun 2021)	program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3,199,945,301.00	-	-	-	3,116,640,017.00	97.40
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan E-gov	Indeks SPBE	2.85	-	-	-	2.36	83	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	613,409,040.00		-	-	610,058,126.00	99.45
									PROGRAM STATISTIK SEKTORAL	203,103,840.00			-	202,403,510.00	99.66
									PROGRAM PENYELANGGARAAN PERSANDI	190,215,300.00		-	-	182,426,271.00	95.91



									AAN UNTU K KEAM ANAN INFO RMAS I						
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan informasi publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	-	-	-	82.72	101	PROG RAM APLIK ASI DAN INFO RMAT IKA	613,409,040.00	-	-	-	610,058,126.00	99.45
4	Meningkatnya Kualitas data Statistik Sektoral	Persentase Komposisi Ketersediaan Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu	100 %	-	-	50 %	50 %	100%							

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 menyajikan berbagai capaian strategis yang tercermin dalam capaian indikator kinerja kegiatan. Berbagai keberhasilan dan kegagalan yang sudah dicapai sepanjang ditentukan oleh adanya komitmen dan dukungan pimpinan. Selain itu dukungan kemampuan personil/ SDM serta sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2021 dan tahun-tahun selanjutnya. Salah satu keberhasilan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2021 kembali mendapatkan penghargaan sebagai **Keterbukaan Informasi Badan Publik Se- Kalbar Tahun 2021 dengan Kualifikasi Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat** (terlampir) dan mendapat nilai **Indeks SPBE 2,36** dengan predikat **CUKUP** (terlampir) walaupun belum mencapai target (2,85) dikarenakan terdapat beberapa hal permasalahan yang dihadapi pada saat penilaian pada evaluasi SPBE Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 termasuk dengan keterbatasan anggaran yang menyebabkan belum bisa melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan nilai SPBE dan masalah yang dihadapi lainnya. Dengan ini dapat menjadi tinjauan Kembali agar Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dapat mendapatkan nilai Evaluasi Baik Kembali.

Secara umum, seluruh target dari setiap sasaran strategis yang dijabarkan dalam IKU telah berhasil dicapai sesuai dengan rencana pada Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021. Selain itu capaian tahun 2021 merupakan pondasi awal dalam rangka mencapai Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026. Realisasi target ini juga diikuti oleh keberhasilan realisasi anggaran yang rata-rata 97,85%.

Hasil capaian kinerja tersebut sudah merupakan upaya optimal dalam penggunaan sumberdaya yang tersedia di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. Perjanjian kinerja pada tahun 2021 merupakan faktor pendorong yang akan



dijadikan sebagai acuan keberhasilan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya demi pencapaian visi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Kapuas Hulu yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Harmonis Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi”*** sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tahun selanjutnya akan lebih baik dan meningkat dibandingkan tahun-tahun berjalan. Capaian kinerja 2021 juga sudah sejalan dengan target prioritas pembangunan, hal ini dapat dilihat dari dukungan hasil kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu 2021.



Lampiran 1

**Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Tahun 2021**


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	Predikat sakiP	BB	BB	100%
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan E-gov	Indek SPBE	2,85	2,36	83%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan informasi public	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	82,72	101%
4	Meningkatnya pengelolaan data statistic lintas sectoral Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu yang Valid	100 %	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA					100%

PUTUSSIBAU, JANUARI 2022
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK
KABUPATEN KAPUAS HULU

Ir. ISTIWA, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650507 199803 1 006



Lampiran 2



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. ISTIWA, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Kapuas Hulu

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : A. M. NASIR, S.H.
Jabatan : Bupati Kapuas Hulu


selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.


Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, 04 Februari 2021

Pihak Kedua,
BUPATI KAPUAS HULU,


A. M. NASIR, S.H.

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KAPUAS HULU,


Ir. ISTIWA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19560507 199803 1 006

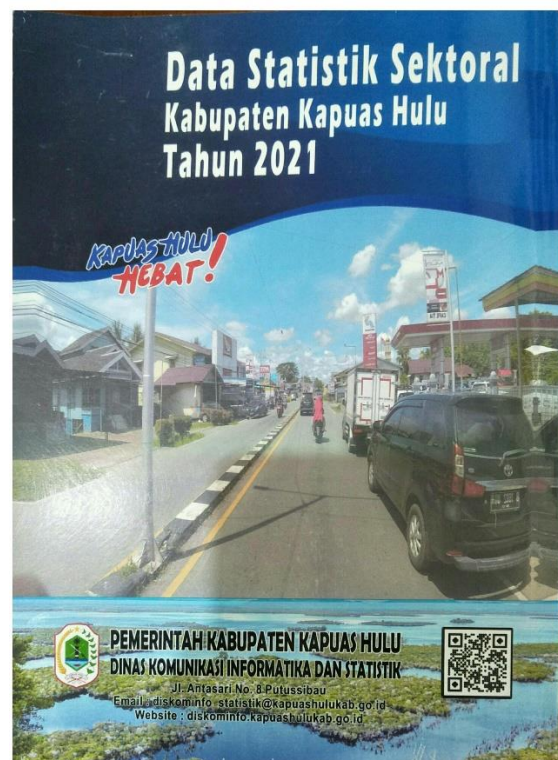


Lampiran 3

Buku Data Statistik Sektoral Kab. Kapuas Hulu Tahun 2021



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner

Lampiran 4


Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2021





Lampiran 4

**Hasil Nilai SAKIP Pada Pemerintahan
Dinas Komunikasi Dan Informatika
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021**

 **PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**
INSPEKTORAT PROVINSI
Jalan Sutan Syahrir No. 3
Telepon Sentral: 0561-760282, Faximile : 0561-760281
PONTIANAK 78121

Pontianak, 26 Agustus 2021

Kepada

Nomor : 700/1931 /LHE-AKIP/2021 Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021

di-

Tempat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Surat Perintah Tugas Gubernur Kalimantan Barat Nomor 094.4/1254/IP-V/2021, kami telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.

Evaluasi dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi ini adalah untuk memperoleh informasi dan menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi Kalimantan Barat memperoleh nilai **75,50** atau predikat **Sangat Baik (BB)**. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas kerjanya Sangat Baik yaitu akuntabel, berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal, dengan rincian penilaian sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2020	2021
a. Perencanaan Kinerja	30	26,00	25,48
b. Pengukuran Kinerja	25	16,25	18,13
c. Pelaporan Kinerja	15	10,42	10,61
d. Evaluasi Internal	10	5,26	5,92
e. Capaian Kinerja	20	14,38	15,38
Nilai Hasil Evaluasi	100	71,51	75,50
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan upaya perbaikan dalam penerapan dan penguatan SAKIP, perbaikan dilakukan dalam hal peningkatan nilai masing-masing komponen yang di nilai dari tahun 2020 ke tahun 2021. Namun ada hasil evaluasi yang masih perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang secara singkat sebagai berikut :

1. Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya, namun belum dilengkapi dengan uraian faktor pendorong keberhasilan dan penghambat kinerja serta rekomendasi yang diperlukan guna perbaikan pada periode berikutnya.
2. Perjanjian kinerja eselon III dan eselon IV yang ditandatangani telah dilakukan pengukuran secara berjenjang, namun belum dilengkapi dengan simpulan keberhasilan dan kegagalan target kinerja yang diperjanjikan.
3. Belum ada mekanisme atau *Standart Operational Procedure* (SOP) dalam pengumpulan data kinerja.
4. Monitoring dan evaluasi program serta pencapaian rencana aksi atas kinerja secara berkala/periodik belum optimal.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan upaya-upaya peningkatan efektifitas implementasi SAKIP, sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring terhadap capaian target jangka menengah dalam Renstra yang dilengkapi dengan uraian faktor pendorong keberhasilan dan penghambat kinerja serta rekomendasi yang diperlukan guna perbaikan pada periode berikutnya.
2. Melakukan penilaian atas kinerja eselon III dan eselon IV yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Hasil penilaian tersebut dilengkapi dengan simpulan keberhasilan dan kegagalan dari target kinerja yang diperjanjikan serta rekomendasi perbaikan untuk setiap target kinerja.
3. Menyusun *Standart Operational Procedure* (SOP) dalam melaksanakan pengumpulan data kinerja.
4. Memerintahkan seluruh pengampu program, kegiatan dan sub kegiatan untuk melaporkan capaian target kinerjanya secara berjenjang dan dilakukan secara periodik/berkala yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk:
 - a. Menilai dan memperbaiki pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.
 - b. Perbaikan keselarasan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan secara berjenjang agar saling menunjang peningkatan efektivitas pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.
 - c. Memberikan rekomendasi dan alternatif perbaikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan setiap periode secara berkala.



Demikian hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 dan kami memberikan apresiasi kepada Kepala Dinas beserta seluruh jajaran atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan SAKIP secara berkelanjutan di lingkungan kerjanya.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

INSPEKTUR PROVINSI,

Dra. MARLYNA, M.Si., CRA., CRP
Pembina Utama Muda
NIP. 19670115 198603 2 008

Tembusan:
Gubernur Kalimantan Barat



**KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	SKPD		KONTROL KERANGKA LOGIS
		Y/T	NILAI	
1	2	3	4	5
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)	30.00	84.92%	25.48	
I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%)	10.00	81.25%	8.13	
a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)	2.00	100.00%	2.00	
1 Renstra SKPD telah disusun		Y	1.00	
2 Renstra telah memuat tujuan		Y	1.00	OK
3 Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)		A	1.00	OK
4 Tujuan telah disertai target keberhasilannya		A	1.00	OK
5 Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y	1.00	OK
6 Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		A	1.00	OK
7 Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		A	1.00	OK
8 Renstra telah menyajikan IKU		A	1.00	OK
9 Renstra telah dipublikasikan		Y	1.00	OK
b. KUALITAS RENSTRA (5%)	5.00	87.50%	4.38	
10 Tujuan telah berorientasi hasil		A	1.00	OK
11 ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		A	1.00	OK
12 Sasaran telah berorientasi hasil		A	1.00	OK
13 indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1.00	OK
14 Target kinerja ditetapkan dengan baik		B	0.75	OK
15 Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan		B	0.75	OK
16 Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD		B	0.75	OK
17 Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan		B	0.75	OK
c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)	3.00	58.33%	1.75	
18 Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran		B	0.75	OK
19 Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		C	0.50	OK
20 Dokumen Renstra telah direvisi secara berkala		C	0.50	OK
II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)	20.00	86.75%	17.35	
a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)	4.00	93.75%	3.75	
1 Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1.00	
2 Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1.00	OK
3 PK telah menyajikan IKU		B	0.75	OK
4 PK telah dipublikasikan		Y	1.00	OK
b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)	10.00	100.00%	10.00	
5 Sasaran telah berorientasi hasil		A	1.00	OK
6 Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1.00	OK
7 Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1.00	OK
8 Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		A	1.00	OK
9 Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		A	1.00	OK
10 Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		A	1.00	OK
11 Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		A	1.00	OK
12 Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1.00	OK
13 Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		A	1.00	OK



14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1.00	OK
c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)		6.00	60.00%	3.60	
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		T	-	OK
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		B	0.75	OK
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		B	0.75	OK
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan		B	0.75	OK
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		B	0.75	OK
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)		25.00	72.50%	18.13	
I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)		5.00	100.00%	5.00	
1	Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal		Y	1.00	
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		A	1.00	
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		A	1.00	OK
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1.00	OK
II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)		12.50	85.00%	10.63	
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		A	1.00	OK
6	IKU telah cukup untuk mengukur kinerja		A	1.00	OK
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		B	0.75	OK
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		B	0.75	OK
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		B	0.75	OK
10	Sudah terdapat ukuran (Indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		B	0.75	OK
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		B	0.75	OK
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		B	0.75	OK
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		Y	1.00	OK
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		Y	1.00	OK
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)		7.50	33.33%	2.50	
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		C	0.50	OK
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		C	-	OK
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		C	-	OK
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment		C	0.50	OK
19	IKU telah direvisi secara berkala		C	0.50	OK
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		B	0.50	OK
C. PELAPORAN KINERJA (15%)		15.00	70.71%	10.61	
I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)		3.00	100.00%	3.00	
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1.00	
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1.00	OK
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y	1.00	OK
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		A	1.00	OK



II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)		7.50	65.43%	4.91	
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome		B	0.75	OK
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		B	0.75	OK
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		B	0.75	OK
8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan		B	0.75	OK
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		C	0.33	OK
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		B	0.75	OK
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		C	0.50	OK
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)		4.50	60.00%	2.70	
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1.00	OK
13	Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan		C	0.50	OK
14	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi		C	0.50	OK
15	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja		C	0.50	OK
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		C	0.50	OK
D. EVALUASI INTERNAL (10%)		10.00	59.22%	5.92	
I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)		2.00	89.00%	1.78	
1	Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatan		Y	1.00	
2	Evaluasi program telah dilakukan		Y	1.00	
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		B	0.67	OK
II. KUALITAS EVALUASI (5%)		5.00	52.83%	2.64	
5	Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		C	0.50	OK
6	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		C	0.50	OK
7	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		C	0.50	OK
8	Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		C	0.50	OK
9	Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		C	0.50	OK
10	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode		B	0.67	OK
III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)		3.00	50.00%	1.50	
11	Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang		C	0.50	OK
12	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		C	0.50	OK
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)		20.00	76.88%	15.38	
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)		7.50	46.67%	3.50	
1	Target dapat dicapai		C	1.00	
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		C	0.50	
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		B	2.00	
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)		12.50	237.50%	11.88	
4	Target dapat dicapai			4.50	
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			2.38	
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			5.00	
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		100.00	75.50%	75.50	



Lampiran 5

**Hasil Nilai SAKIP Pada Pemerintahan
Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Angkasa Pura II Komp. Perkantoran Pemda Telp.(0561) 723700 Sungai Raya

Nomor : 700/ II /Inspt -A
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2020 pada
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika

Sungai Raya, 15 Juli 2021

Yth. Bupati Raya
Di -
Sungai Raya

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya, dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan Akuntabilitas Instansi.
 - d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi:
 - a. Perencanaan Kinerja;
 - b. Pengukuran Kinerja;
 - c. Pelaporan Kinerja;
 - d. Evaluasi Kinerja; dan
 - e. Capaian Kinerja.
3. Dokumen yang dievaluasi yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan (PK), serta dokumen terkait lainnya.

Dalam melaksanakan evaluasi atas implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), untuk satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya, evaluasi (evaluator) Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya melakukan evaluasi terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Aspek Perencanaan Kinerja meliputi;
 - 1) Perencanaan Strategis, meliputi sub komponen Pemenuhan Renstra,



- 2) Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, meliputi sub komponen Pemenuhan Perencanaan kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahunan;
 - b. Aspek Pengukuran Kinerja meliputi;
 - 1) Pemenuhan Pengukuran;
 - 2) Kualitas Pengukuran;
 - 3) Implementasi Pengukuran.
 - c. Aspek Pelaporan Kinerja meliputi;
 - 1) Pemenuhan Pelaporan;
 - 2) Penyajian Informasi Kinerja;
 - 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja
 - d. Evaluasi Internal meliputi;
 - 1) Pemenuhan Evaluasi;
 - 2) Kualitas Evaluasi;
 - 3) Pemanfaatan Evaluasi
 - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi meliputi
 - 1) Kinerja yang di Laporkan (Output)
 - 2) Kinerja yang di Laporkan (Outcome)
 - 3) Kinerja Yang Di Laporkan (IKU)
- Kinerja dari Penilaian Stakeholder

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 s.d. 100 pada Dinas Komunikasi dan Informatika memperoleh nilai sebesar 74,47 dengan interpretasi predikat BB (Sangat Baik)

4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan instansi pemerintah SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2020
A	Perencanaan Kinerja	30	23,95
B	Pengukuran Kinerja	25	16,57
C	Pelaporan Kinerja	15	15,00
D	Evaluasi Kinerja	10	5,20
E	Capaian Kinerja	20	13,75
Nilai Hasil Evaluasi		100	74,47



5. Sehubungan dengan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2020 seperti tersebut diatas. Kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, beserta seluruh jajarannya agar melakukan bisa mempertahankan kinerja yang sudah memuaskan, namun demikian masih ada beberapa yang perlu perbaikan sebagai berikut:
- a. Dokumen Renstra tidak dilakukan secara berkala sehingga hasilnya belum menunjukkan hasil yang lebih baik (terdapat inovasi).
 - b. Rencana Kinerja Tahunan seharusnya dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran, karena dalam pemenuhan kualitas perencanaan kinerja tahunan dan target kinerja sasaran dalam rencana kinerja tahunan menjadi persyaratan dalam pengajuan dan pengalokasian anggaran
 - c. Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi agar dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semesteran) diilengkapi dengan SOP pengumpulan data.
 - d. Agar melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari staf sampai pimpinan tertinggi, tingkat instansi dan pengukuran tersebut



- e. Melakukan breakdown target kinerja tahunan kedalam target bulanan yang selaras dan terukur serta menunjuk pihak atau bagian yang bertanggung jawab untuk melaporkan dan memonitor baik secara lisan maupun tertulis secara periodik yang dilengkapi dengan mekanisme monitoring (SOP)
- f. Pengukuran kinerja atas rencana aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan:
 - sebagai dasar untuk menyimpulkan kemajuan (Progres) kinerja
 - sebagai dasar untuk mengambil tindakan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan
 - sebagai dasar untuk menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.
- g. Melakukan evaluasi rencana aksi sehingga dapat menunjukkan perbaikan setiap periode baik secara triwulan maupun semesteran.
- h. Setiap langkah yang dilakukan agar selalu dilengkapi dokumen bukti pendukung

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika, kami menghargai upaya saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan instansi SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika. Berikut terlampir beberapa hal yang merupakan penjelasan dari poin 1 s/d 5.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama saudara.


INSPEKTUR,

H. Y. Hardito, Ak. MM
Pembina Tingkat I/IVb
Nip. 19720627 199302 1 001

Tembusan :
1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Lampiran : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2020

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen	Hasil Penilaian (%)
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%) Kualitas Renstra (5%) Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi: Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) Implementasi RKT (6%)	9,50 2,00 5,00 2,50 14,45 3,75 8,00 2,70
2	Pengukuran Kinerja	25%	Pengukuran Kinerja (25%) meliputi : a. Pemenuhan pengukuran ;(5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)	16,57 4,38 9,38 2,81
3	Pelaporan Kinerja	15%	Pelaporan Kinerja (15%) meliputi : a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)	15,00 3,00 7,50 4,50
4	Evaluasi Internal	10%	Evaluasi Internal (10%) meliputi : a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)	5,20 1,71 2,37 1,13
5	Capaian Kinerja	20%	Pencapaian sasaran/Kinerja Organisasi (20%) meliputi : a. Kinerja yang dilaporkan (output) (7,5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (12,50%)	13,75 7,50 6,25
Total		100%		74,47

INSPEKTUR,

H. V. Hardito Ak. MM



Lampiran 6

Hasil nilai Indeks SPBE Tahun 2021



Rekomendasi

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada seluruh Instansi. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan, sudah dapat menggambarkan predikat Cukup dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki adalah pada kesediaan dalam mengikuti Penilaian dengan sebaik mungkin dan hadir secara kolaboratif dalam pelaksanaan evaluasi SPBE 2021. Penerapan SPBE baik Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik. Keunggulan ini terlihat dari dengan adanya penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan. Layanan Administrasi Pemerintahan sudah menerapkan pengintegrasian dengan aplikasi umum berbagi pakai pada bidang perencanaan/penganggaran, dan kearsipan sehingga secara administratif dapat terinventarisasi dan terdokumentasi secara baik. Begitu juga dengan penerapan Aspek Layanan Publik, secara umum aplikasi publik sudah terintegrasi dengan layanan publik lainnya seperti aplikasi Pengaduan publik (SPAN LAPOR) serta aplikasi pengadaan (SPSE). Seluruh keunggulan tersebut saling terkait, sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan SPBE di internal menjadi efektif dan efisien, baik dari sisi anggaran maupun kinerja menjadi optimal

Namun disisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan, khususnya pada Kebijakan Internal terkait Tata Kelola, Aspek Perencanaan Strategis, Aspek Penerapan TIK, Aspek Penyelenggara SPBE, Aspek Penerapan Manajemen TIK dan Aspek Audit TIK. Hal tersebut mungkin terjadi karena dari tahun dimulai diterapkannya Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 ini masih belum terdapat kebijakan atau peraturan turunan yang mengatur penerapan SPBE di Internal. Sehingga arah dan kebijakan strategis, taktis dan operasional Penerapan SPBE masih belum tersusun dan terkelola dengan baik.

Peran Tim Koordinasi SPBE sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan dalam penerapan TIK di dalam menjalankan proses penyelenggaraan di internal Instansi. Peran strategis, taktis dan operasional perlu dipetakan dan diorganisasi kembali ke masing-masing OPD, sehingga tanggung jawab penerapan SPBE di masing-masing instansi tidak hanya diampu oleh Dinas Kominfo saja. Dokumen kebijakan SPBE merupakan pedoman utama dalam penerapan SPBE. Berawal dari Kebijakan SPBE maka dapat selanjutnya untuk menyusun arsitektur SPBE dengan berkoordinasi dengan Kementerian PANRB. Setelah menyusun Arsitektur SPBE yang sesuai dengan pedoman Nasional maka selanjutnya adalah melakukan perencanaan penerapan SPBE melalui Peta Rencana SPBE. Peta Rencana SPBE disusun secara lengkap tanpa terkecuali serta mengikuti alur Arsitektur yang diharapkan. setelah seluruh kegiatan terencana maka mulai dilaksanakan sesuai perencanaan tersebut dan dapat dimonitoring output dari setiap perencanaan dari Peta Rencana SPBE tersebut.



- Kelemahan
Namun disisi lain, Kapuas Hulu masih belum memiliki layanan pengaduan publik yang matang

kapuas hulu adalah dengan adanya pembangunan aplikasi, dan layanan pusat data

- Kekuatan
Pada Aspek teknologi informasi dan komunikasi kapuas hulu belum menunjukkan adanya kematangan yang kuat
- Kelemahan
Namun disisi lain, kapuas hulu masih belum memiliki penerapan jaringan intra dan penggunaan sistem penghubung layanan.

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada penyelenggara SPBE yang sudah dipenuhi oleh kapuas hulu adalah dengan bukti tim koordinasi spbe dan kolaborasi penerapan SPBE

- Kekuatan
Pada Aspek penyelenggara SPBE ini kapuas hulu belum menunjukkan kekuatan
- Kelemahan
Namun disisi lain, kapuas hulu masih belum kolaborasi penerapan SPBE

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek penerapan manajemen yang sudah dipenuhi oleh kapuas hulu adalah dengan adanya penerapan manajemen risiko, manajemen sumber daya manusia dan manajemen layanan SPBE

- Kekuatan
Pada Aspek penerapan manajemen SPBE di kapuas hulu belum menunjukkan adanya kekuatan
- Kelemahan
Namun disisi lain, kapuas hulu masih belum dapat menunjukkan penerapan manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset tik, manajemen sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan spbe

F. Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Audit TIK belum ada yang dipenuhi oleh Kapuas Hulu

- Kekuatan
Pada Aspek Audit TIK, Kapuas Hulu belum memiliki kekuatan
- Kelemahan
Namun disisi lain, Kapuas Hulu masih belum memiliki kematangan dalam audit infrastruktur, audit aplikasi dan audit keamanan

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang sudah dipenuhi oleh Kapuas Hulu adalah dengan adanya layanan perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, pengelolaan barang milik negara, pengawasan internal, akuntabilitas kinerja dan kinerja pegawai

- Kekuatan
Kapuas Hulu, ada Aspek Administrasi pemerintahan berbasis elektronik ini dapat terlihat adanya layanan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kapuas Hulu.
- Kelemahan
Namun disisi lain, Kapuas Hulu masih belum memiliki layanan kearsipan dan layanan pengelolaan barang milik negara dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung atau pengaturan dalam kebijakan internal yang disampaikan

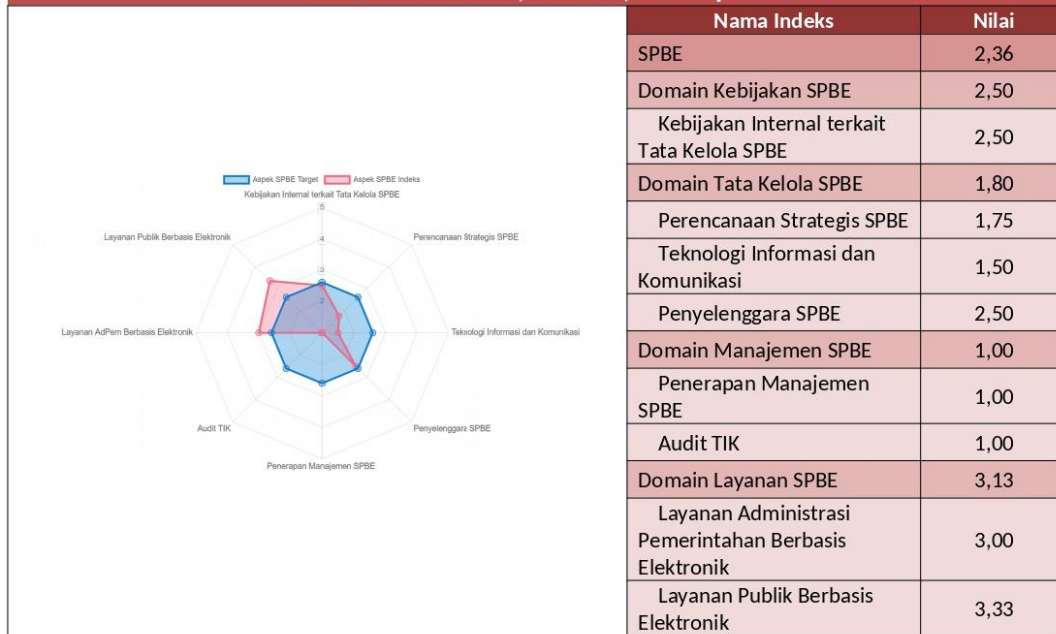
H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek layanan publik berbasis elektronik yang sudah dipenuhi oleh Kapuas Hulu adalah dengan adanya layanan pengaduan pelayanan publik, layanan data terbuka, layanan JDIH, layanan publik sektor 1, sektor 2 dan sektor 3.

- Kekuatan
Pada Aspek layanan publik berbasis elektronik ini dapat terlihat layanan data terbuka, layanan JDIH dan layanan publik sektor 2 menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kapuas Hulu

**INDEKS SPBE – PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU****2,36**

(Cukup)

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek**Kekuatan dan Kelemahan****A. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE**

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Kapuas adalah dengan adanya Kebijakan Arsitektur SPBE, Kebijakan Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, pembangunan aplikasi, layanan pusat data, pengoperasian jaringan intra sistem penghubung layanan, manajemen keamanan informasi, audit TIK, dan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE

- **Kekuatan**
Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola ini dapat terlihat adanya Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kabupaten Kapuas Hulu.
- **Kelemahan**
Namun disisi lain, Kab Kapuas Hulu masih belum memiliki kebijakan internal yang mengatur terkait pembangunan aplikasi, layanan pusat data, pengoperasian jaringan intra sistem penghubung layanan, manajemen keamanan informasi, audit TIK

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek perencanaan strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh Kab Kapuas Hulu adalah dengan adanya Arsitektur SPBE, dan Peta Rencana SPBE

- **Kekuatan**
Pada Aspek perencanaan strategis ini Kab Kapuas Hulu belum terlihat memiliki kekuatan.
- **Kelemahan**
Namun disisi lain, Kapuas Hulu masih belum memiliki dokumen rencana dan anggaran, dan inovasi proses bisnis

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

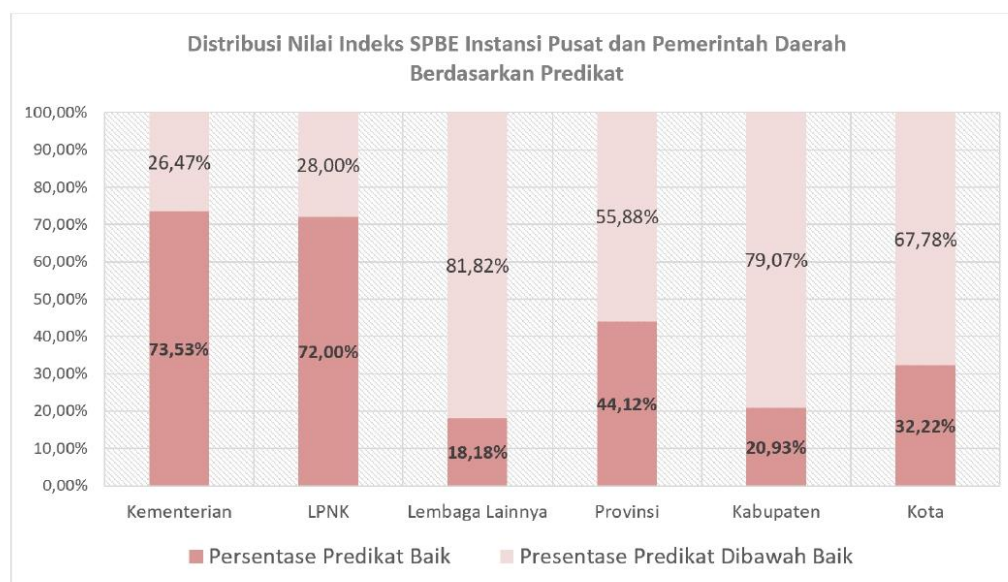
Secara keseluruhan penerapan pada Aspek teknologi informasi dan komunikasi yang sudah dipenuhi oleh



EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2021

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE		
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
Aspek 1 - Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	13%	1	4,2 – 5,0	Memuaskan
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%	3	2,6 – < 3,5	Baik *)
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%	4	1,8 – < 2,6	Cukup
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%	5	< 1,8	Kurang
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%	*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)		
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%			
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%			
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%			
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%			
Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	18%			

Indeks	Rata-rata nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,24	2,84	2,77	2,10	2,46	2,11	2,29
Domain Kebijakan	2,21	2,68	2,81	1,89	2,26	2,13	2,23
Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola	2,21	2,68	2,81	1,89	2,26	2,13	2,23
Domain Tata Kelola	1,89	2,61	2,56	1,83	2,14	1,73	1,91
Perencanaan Strategis	1,77	2,36	2,47	1,80	1,91	1,62	1,78
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00	2,86	2,71	1,86	2,36	1,82	1,99
Penyelenggaraan SPBE	1,93	2,59	2,46	1,82	2,16	1,78	2,02
Domain Manajemen	1,23	1,50	1,39	1,25	1,31	1,17	1,26
Penerapan Manajemen SPBE	1,26	1,53	1,37	1,25	1,35	1,20	1,29
Audit TIK	1,17	1,43	1,44	1,23	1,22	1,11	1,17
Domain Layanan SPBE	2,81	3,49	3,37	2,62	3,10	2,66	2,88
Administrasi Pemerintahan	2,86	3,50	3,48	2,86	3,14	2,71	2,88
Layanan Publik	2,74	3,49	3,21	2,26	3,04	2,59	2,88



**EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2021****Ringkasan Eksekutif**

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE.

Pada tahun 2021, pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan, dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator, dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penyesuaian atas instrumen dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan diterapkannya instrumen baru ini tentunya terdapat penyesuaian dalam penilaian yang berdampak pada penurunan nilai indeks SPBE di hampir seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terutama pada indikator-indikator baru yang dinilai pada tahun ini. Namun hal ini ditargetkan untuk memenuhi cakupan yang lebih komprehensif, dimana hasil penilaian tahun ini merepresentasikan indeks penerapan SPBE dengan kualitas yang lebih optimal.

Hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2021 ini akan menjadi *baseline* kondisi penerapan dengan kesesuaian kriteria dan kondisi yang harus dipenuhi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk itu diharapkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SPBE setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat digunakan dalam menentukan strategi tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interviu melalui proses verifikasi, klarifikasi, dan validasi dokumen pendukung.

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE**Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Proses**

1. Rintisan	• Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan Proses tata kelola dilaksanakan secara <i>ad-hoc</i> .
2. Terkelola	• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi.
3. Terstandar-disasi	• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi.
4. Terintegrasi dan Terukur	• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif.
5. Optimum	• Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas.

Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Fungsi Teknis

1. Informasi	• Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah.
2. Interaksi	• Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah.
3. Transaksi	• Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.
4. Kolaborasi	• Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE lain.
5. Optimalisasi	• Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2021 telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2021 dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPBE yang terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara instansi pusat dan pemerintah daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan semua pemangku kepentingan termasuk Kementerian Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah.

Jakarta, 29 Desember 2021

Deputi Bidang Kelembagaan
dan Tata Laksana,



Rini Widyantini



Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	2
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	2
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	2
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	2
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	2
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	2
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	4
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	2
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah	1
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	2
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	3
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	3
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	1
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	2
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	2
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	4
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	3
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	4
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3



Lampiran 7

Pengelola Data Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2021

**PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDER
DAN PER UNSUR PELAYANAN
LAYANAN DISKOMINFOTIK KABUPATEN KAPUAS HULU**

NO. RESPONDER	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		MUTU PELAYANAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
2	3	3	3	4	3	3	3	3	3		
3	3	4	3	4	3	4	3	3	4		
4	4	4	3	4	3	4	4	4	4		
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
6	3	3	4	4	3	4	3	4	4		
7	3	3	3	4	3	3	3	3	4		
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
9	3	3	3	4	3	3	3	2	3		
10	3	4	4	4	4	3	4	4	4		
11	3	4	4	4	3	4	4	2	4		
12	3	2	3	4	2	3	3	1	2		
13	3	3	3	3	3	3	3	3	4		
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
15	3	3	2	4	3	3	3	2	4		
16	3	4	4	4	4	4	3	3	4		
17	4	4	3	4	4	3	3	2	4		
18	4	4	4	4	3	3	4	3	3		
19	3	3	3	4	3	3	3	3	4		
20	3	3	3	4	4	3	4	3	4		
21	3	3	4	4	3	4	4	3	4		
22	3	2	3	4	3	2	3	2	2		
23	4	3	4	4	4	3	4	4	4		
24	2	2	2	4	3	3	3	2	1		
25	2	3	3	3	3	3	3	3	4		
26	3	3	3	4	3	3	3	3	4		
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
28	2	3	2	4	2	2	3	3	3		
29	4	4	4	4	4	4	4	4	3		
30	4	4	3	4	4	4	3	1	4		



31	2	3	3	3	3	3	3	3	4
32	3	3	3	4	3	3	3	3	4
33	3	4	4	4	3	4	4	3	4
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3
35	4	4	3	4	4	3	3	2	4
36	3	3	3	4	3	3	3	3	4
37	3	3	3	4	3	3	3	3	4
38	3	4	4	4	4	4	4	4	4
39	3	4	3	4	4	3	4	4	4
40	3	2	3	4	3	3	4	4	2
41	3	3	4	4	4	3	3	2	4
42	2	3	3	3	3	3	4	3	4
43	3	3	3	4	2	3	3	1	2
44	4	3	4	4	4	4	4	4	4
45	3	3	3	4	3	3	3	3	4
46	3	3	3	4	4	4	4	4	4
47	3	4	3	4	3	3	3	3	4
48	3	4	3	4	3	3	4	4	4
49	2	3	2	4	3	3	4	4	4
50	3	3	4	4	3	3	3	3	4
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3
52	3	2	2	4	3	2	3	1	2
53	4	3	3	4	4	4	4	3	4
54	2	2	1	4	2	2	2	2	2
55	3	3	3	4	3	3	3	2	2
56	3	3	3	4	3	3	4	4	4
57	3	3	3	4	3	3	4	4	4
58	3	3	2	3	3	3	3	3	3
59	4	4	4	4	3	3	4	3	0
60	4	4	4	4	4	4	4	4	3
61	3	3	3	4	4	3	3	4	3
62	3	3	3	4	3	3	3	3	3
63	3	4	3	4	3	3	3	3	4
64	3	3	4	4	3	3	4	3	4
65	3	3	3	3	3	4	4	3	4
66	3	4	3	4	4	3	4	4	4
67	4	3	3	4	4	3	3	1	4
68	3	3	3	4	3	3	3	2	3
69	3	3	3	4	3	4	3	3	4
70	3	3	4	4	4	4	3	3	4
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3
72	3	3	3	4	3	3	3	3	4
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4



74	3	3	3	4	3	3	3	2	2		
75	3	4	4	4	3	4	3	3	4		
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
77	3	4	4	4	4	4	4	4	4		
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
79	2	3	3	3	3	3	3	3	2		
80	3	3	3	4	4	3	3	2	4		
81	3	4	3	4	4	4	3	3	4		
82	3	3	3	3	3	3	3	2	2		
83	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
84	3	3	3	3	3	3	3	3	4		
85	4	3	4	4	4	4	4	4	4		
86	3	4	3	4	3	3	3	3	4		
87	4	3	4	4	4	3	3	4	4		
88	3	3	3	3	3	3	3	3	4		
89	3	3	3	3	3	3	3	3	4		
90	4	3	3	4	3	4	3	1	4		
91	4	4	4	4	4	4	4	3	4		
92	3	3	3	3	3	3	3	3	4		
93	3	3	3	4	3	3	3	3	0		
94	3	3	3	3	3	3	3	4	4		
95	4	4	3	4	4	4	4	4	4		
96	3	3	3	3	3	3	3	3	4		
97	3	3	3	4	3	3	3	2	3		
98	4	4	4	3	3	3	3	4	4		
99	3	3	3	4	3	3	3	3	4		
100	3	4	4	4	4	4	4	4	4		
JUMAH NILAI PER UNSUR	315	326	321	378	328	326	334	302	351		
NRR PER UNSUR	3.15	3.26	3.21	3.78	3.28	3.26	3.34	3.02	3.51		
NRR TERTIMBANG/UNSUR	0.35	0.36	0.36	0.42	0.36	0.36	0.37	0.34	0.39	3.31	
IKM UNIT PELAYANAN										82.72	B (BAIK)



NO.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	PERSYARATAN	3.15
U2	PROSEDUR	3.26
U3	WAKTU PELAYANAN	3.21
U4	BIAYA/TARIF	3.78
U5	PRODUK LAYANAN	3.28
U6	KOMPETENSI PELAKSANA	3.26
U7	PERILAKU PELAKSANA	3.34
U8	SARANA DAN PRASARANA	3.02
U9	PENANGANAN PENGADUAN	3.51

IKM UNIT PELAYANAN

MUTU PELAYANAN :

A (SANGAT BAIK)	= 88,31 - 100,00
B (BAIK)	= 76,61 - 88,30
C (KURANG BAIK)	= 65,00 - 76,60
D (TIDAK BAIK)	= 25,00 - 64,99

KETERANGAN :

U1 - U9	= UNSUR-UNSUR PELAYANAN
IKM	= INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
NRR	= NILAI RATA-RATA
NRR PER UNSUR	= JUMLAH NILAI PER UNSUR DIBAGI JUMLAH KUESIONER YANG TERISI
NRR	
TERTIMBANG	= NRR PER UNSUR X 0,111 PER UNSUR